

SEMINAR RISET TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA: MENUJU PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI RESEARCH SEMINAR ON CHILD EDUCATION POLICY IN INDONESIA: TOWARDS EVIDENCE- BASED POLICY DEVELOPMENT



Norita Mutiara/SMERU

Seminar riset tentang Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia yang diselenggarakan di Tangerang pada 17 November 2011 merupakan kerja sama UNICEF dan SMERU di bawah arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
(Bersambung ke hlm. 3)

*The research seminar on Child Education Policy in Indonesia, held in Tangerang, 17 November 2011 was jointly organized by UNICEF and SMERU under the leadership of the National Development Planning Board (Bappenas) and the Ministry of National Education (now the Ministry of Education and Culture).
(Continued on page 3)*

DARI EDITOR/FROM THE EDITOR	2
PROLOG/PROLOGUE	1
MUTU PENDIDIKAN/QUALITY OF EDUCATION	
Peningkatan Mutu Pendidikan di Pulau Terpencil: Kasus Program SRA di Sekolah-Sekolah Dasar Kabupaten Lembata, NTT	6
<i>Improving the Quality of Education in Remote Areas: The Case of the SRA Program in the Elementary Schools of Kabupaten Lembata, NTT</i>	
MANAJEMEN & KEUANGAN PENDIDIKAN/EDUCATION MANAGEMENT & FINANCE	
Kesiapan Bersekolah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya	14
<i>School Readiness and the Influencing Factors</i>	
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah: Analisis Data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 2000 dan 2007	24
<i>Evaluation of the Impact of the School Operational Assistance Program Implementation: Data Analysis of the Indonesian Family Life Survey (IFLS), Years 2000 and 2007</i>	
PAUD/ECE	
PAUD di Banten: Beroperasinya Modal Budaya dan Kesiapan Bersekolah	31
<i>Early Childhood Education in Banten: Cultural Capital and School Readiness</i>	
Pentingnya Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Gizi Seimbang pada PAUD	41
<i>The Importance of Policies That Integrate Education on Balanced Nutrition into Early Childhood Education</i>	

Buletin SMERU lainnya tersedia di www.smeru.or.id.
Other newsletters are available on www.smeru.or.id.



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, perbaikan sektor sosial, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kajian independen sebagaimana yang dilakukan oleh SMERU selama ini terus dibutuhkan.

SMERU is an independent institution for research and policy studies which professionally and proactively provides accurate and timely information as well as objective analysis on various socioeconomic and poverty issues considered most urgent and relevant for the people of Indonesia.

With the challenges facing Indonesian society in poverty reduction, social protection, improvement in social sector, development in democratization processes, and the implementation of decentralization and regional autonomy, there continues to be a pressing need for independent studies of the kind that SMERU has been providing.

DEWAN REDAKSI/EDITORIAL BOARD:

Asep Suryahadi, Widjajanti Isdjioso, Syaikhul Usman,
Bambang Sulaksono, Nuning Akhmadi, Vita Febriany,
Palmira Permata Bachtiar, Luhur Bima

REDAKSI/EDITORIAL STAFF:

Editor/Editors/
Penerjemah/English Translators: Liza Hadiz, Budhi Adrianto,
Gunardi Handoko, Mukti Mulyana
Perancang Grafis/Graphic Designer: Novita Maizir
Distribusi/Distribution: Mona Sintia

Buletin SMERU diterbitkan untuk berbagi gagasan dan mengundang diskusi mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Temuan, pandangan, dan interpretasi yang dimuat dalam buletin SMERU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan di luar tanggung jawab SMERU atau badan penyanggah dana SMERU. Silakan mengirim komentar Anda. Jika Anda ingin terdaftar dalam mailing list kami, kunjungi situs web SMERU atau kirim e-mail Anda kepada kami.

The SMERU newsletter is published to share ideas and to invite discussions on social, economic, and poverty issues in Indonesia from a wide range of viewpoints. The findings, views, and interpretations published in the articles are those of the authors and should not be attributed to SMERU or any of the agencies providing financial support to SMERU. Comments are welcome. If you would like to be included on our mailing list, please visit our website or send us an e-mail.

LEMBAGA PENELITIAN
SMERU
RESEARCH INSTITUTE

Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10330 Indonesia
Phone: 6221-3193 6336; Fax: 6221-3193 0850
e-mail: smeru@smeru.or.id; website: www.smeru.or.id
Twitter: @SMERUInstitute

Pembaca yang Budiman,

Meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara internasional untuk mencapai target pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2015, masih banyak persoalan seputar pendidikan selain persoalan akses terhadap pendidikan. Termasuk dalam isu-isu tersebut adalah persoalan pemerataan dan kualitas pendidikan. Untuk menyikapi masalah-masalah ini, perlu tersedia rekomendasi-rekomendasi berbasis bukti yang dihimpun dari penelitian yang saksama agar dapat diandalkan oleh pemerintah.

Pada November 2011, Lembaga Penelitian SMERU, dalam kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan UNICEF Indonesia, menyelenggarakan seminar riset tentang Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia. Seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari kerja sama yang tengah berlangsung antara SMERU dan UNICEF untuk mendukung pengembangan kebijakan mengenai isu-isu yang terkait dengan anak dan kemiskinan. Undangan untuk menulis makalah diumumkan sebelum berlangsungnya seminar dan 20 makalah kebijakan terpilih dipresentasikan dan didiskusikan dalam seminar ini. Akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan merupakan isu yang mendapat sorotan selama diskusi, misalnya yang terkait dengan kesenjangan keterjaminan mutu pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi serta antardaerah, dampak pendidikan anak usia dini, efisiensi dalam pengelolaan sekolah, dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Edisi ini menyajikan ringkasan 5 dari 20 makalah kebijakan yang disebutkan di atas. Catatan kebijakan dan makalah kebijakan yang akan diterbitkan SMERU dalam waktu dekat ini juga akan memperkaya wacana kebijakan mengenai kesejahteraan anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa tersedianya informasi dan bukti akan membekali pengambil kebijakan dengan wawasan yang objektif mengenai masalah yang ada dan membantu mereka dalam menetapkan arah dan tujuan kebijakan yang jelas-hal yang menjadikan kajian terpercaya landasan bagi pengambilan kebijakan.

Selamat membaca.

Liza Hadiz

Editor

Dear Readers,

While the Government of Indonesia has made international commitments to achieve universal basic education by 2015, there are still many issues surrounding education which go beyond the issue of access; these include, in particular, issues of equity and quality. In order to deal with these problems, the government needs to be able to rely on the availability of evidence-based recommendations drawn from sound research.

Last year in November 2011, The SMERU Research Institute jointly with the Ministry of National Education (now the Ministry of Education and Culture), the National Development Planning Board (Bappenas), and UNICEF Indonesia held a research seminar on Child Education Policy in Indonesia. The seminar was conducted as part of SMERU's ongoing collaboration with UNICEF to support policy development on child- and poverty-related issues. A call for papers was announced prior to the seminar and 20 selected policy papers were presented and discussed in the seminar. Issues concerning access, equity, and quality were evident throughout the discussion, such as the gaps in quality assurance between socioeconomic groups as well as regions, the impact of early childhood education, efficiency in school management, and parent and community participation in education service delivery.

This edition presents 5 articles derived from the 20 policy papers. A forthcoming SMERU policy brief and policy paper will further contribute to the policy discourse on children's well-being. It is undeniable that the availability of information and evidence provide policymakers with objective insight of the matter at hand and help them define clear policy direction and objectives, making credible research the basis of policymaking.

We hope you enjoy this edition.

Liza Hadiz

Editor

SEMINAR RISET TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA: MENUJU PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI

RESEARCH SEMINAR ON CHILD EDUCATION POLICY IN INDONESIA: TOWARDS EVIDENCE-BASED POLICY DEVELOPMENT

Angela Kearney*



Novita Maizir/SMERU

Tujuan seminar ini adalah untuk (i) membahas temuan studi kebijakan dan studi lainnya tentang berbagai aspek pendidikan anak, termasuk perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penjaminan kualitas dalam layanan pendidikan baik di tingkat regional maupun nasional; (ii) memberikan rekomendasi berbasis bukti dan melakukan advokasi bagi perbaikan program pendidikan dan prakarsa baru untuk mendukung program pemerintah; dan (iii) mempublikasikan hasil seminar bagi pemangku kepentingan terkait dan masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan berbagi pengetahuan dan penyebaran informasi.

Seminar ini tidak hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi pertalian antara peneliti, praktisi pembangunan, dan pembuat kebijakan dalam hal isu-isu pendidikan anak, tetapi juga untuk secara langsung memberikan kepada pemerintah rekomendasi perbaikan kebijakan yang bersumber dari penelitian berkualitas hasil karya peneliti-peneliti Indonesia. Prakarsa kolaboratif

The objectives of the seminar were to: (i) discuss the findings of policy research and studies on various aspects related to children's education including planning, policy and implementation, monitoring and evaluation, and quality assurance on education services, both at the regional and national levels; (ii) provide evidence-based recommendations and advocate for improved education program and new initiatives to support the government program; and (iii) publish the seminar results for relevant stakeholders and the general public as part of knowledge sharing and information dissemination.

This seminar aimed not only at facilitating the link between researchers, development practitioners, and policymakers on children's education issues, but also to directly provide the government with recommendations for policy improvements emerging from quality research undertaken by Indonesian researchers. This collaborative initiative also reflected the Government of Indonesia's continued

* Angela Kearney adalah Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia.

* Angela Kearney is the UNICEF Indonesia Representative.

ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakannya berbasis bukti dan penelitian.

Dari 63 makalah yang terima dari berbagai daerah di Indonesia dan memenuhi syarat, 20 makalah—yang meliputi berbagai isu yang terkait dengan pendidikan—disajikan dalam seminar ini. Dari kedua puluh makalah tersebut, beberapa yang dianggap memiliki relevansi diterbitkan dalam buletin ini untuk didiseminasikan kepada khalayak lebih luas.

Menjamin pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia merupakan ranah tematik yang dibahas dalam seminar dan beberapa keprihatinan yang mengemuka didokumentasikan dalam buletin ini melalui artikel Tilaar, Sutjipto, dan Handoyo tentang peningkatan kualitas pendidikan dengan menggunakan kasus Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Artikel ini menyoroti penggunaan metode Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) oleh 6 sekolah dasar percontohan yang kemudian direplikasi di 56 sekolah lain di kabupaten tersebut. Studi ini juga mencurahkan perhatian pada fakta bahwa keberhasilan metode tersebut mensyaratkan adanya komitmen manajemen sekolah dan keterlibatan pemangku kepentingan seperti perkumpulan orang tua siswa dan komite sekolah. Tilaar, Sutjipto, dan Handoyo juga merekomendasikan perlunya peningkatan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program SRA.

Pembangunan fondasi pendidikan dimulai pada usia dini. Artikel kedua, oleh Weny S. Pandia *et al.*, membahas kesiapan anak untuk bersekolah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Artikel ini mengemukakan bahwa pengembangan anak usia dini berperan penting dalam memengaruhi kesiapan anak untuk bersekolah dan menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, komunitas/kader, dan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa pengembangan anak usia dini dapat memperkenalkan pengalaman positif kepada anak-anak dan juga memperkaya keterampilan berbahasa anak serta mendorong pertumbuhan fisik, emosional, dan kognitif mereka. Dalam hal peran masyarakat, pengembangan anak usia dini membutuhkan kader terampil yang memahami pendidikan holistik. Artikel ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mendukung pengembangan anak usia dini melalui peraturan daerah yang relevan serta alokasi anggaran untuk PAUD terpadu.

Artikel ketiga oleh Felix Wisnu Handoyo mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menggunakan data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia gelombang ketiga pada 2000 dan keempat pada 2007. Studi ini dilakukan untuk melihat dampak BOS terhadap pendidikan dasar di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa

commitment to ensure that its policies are informed by evidence and research.

From a total of 63 papers that were deemed qualified and submitted from different regions of Indonesia, twenty of them were presented in the seminar, covering various issues pertaining to the education sector. Among these, a few papers that were considered to be of particular relevance are being published in this newsletter to be shared with a broader audience.

Ensuring quality education throughout Indonesia was a thematic area that was discussed in the seminar and some of the concerns raised have been documented in this newsletter through a paper by Tilaar, Sutjipto, and Handoyo on improving the quality of education using the case of Sekolah Ramah Anak (SRA) in the Kabupaten (district of) Lembata, East Nusa Tenggara (NTT). The paper highlights the use of the Active, Creative, Effective, and Fun Learning (PAKEM) method in six pilot elementary schools, which was then replicated in 56 other schools in the district. The study also drew attention to the fact that the success of the method required the commitment of the school management, and the involvement of the stakeholders such as the parents' association and school committees, among others. Tilaar, Sutjipto, and Handoyo also recommended the need to improve the role and capacity of the stakeholders to implement SRA.

The foundation of education starts at an early age. The second paper, written by Weny S. Pandia, et al., discusses school readiness and the influencing factors for children. The paper argues that early childhood development (ECD) is important in influencing school readiness among children and calls for a cross-sectoral involvement of the family, school, community/cadres, and the government. The study found that early childhood development can introduce positive experiences among children and also enrich children's language skills as well as their physical, emotional, and cognitive growth. In terms of the role of the community, early childhood development requires skilled cadres who understand holistic education. The paper recommends that local governments support early childhood development through relevant local regulations along with budget allocations for integrated ECD.

The third article by Felix Wisnu Handoyo evaluates the impact of the School Operational Assistance (BOS) program implementation using the 2000 and 2007 data from the Indonesian Family Life Survey. The study was conducted to look at the impact of BOS on basic education in Indonesia. It shows that the BOS program is effective in increasing students' school participation in national examinations;

Program BOS efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dalam ujian nasional. Namun, dampak dalam bentuk peningkatan nilai ujian hanya kentara dalam ujian nasional siswa SMP. Studi ini juga menemukan bahwa dana BOS lebih efektif didistribusikan melalui sekolah daripada langsung kepada siswa, baik di jenjang SD maupun SMP.

Studi keempat oleh Priyono membahas modal budaya dan kesiapan bersekolah berkaitan dengan pendidikan anak usia dini di Banten. Studi ini menyoroti perbedaan praktik pendidikan anak pada berbagai kelas sosial di daerah tersebut dan berkesimpulan bahwa latar belakang pendidikan orang tua berkorelasi dengan kesiapan anak untuk bersekolah. Menurut guru-guru yang diwawancarai, anak-anak dari keluarga mampu dapat memahami instruksi di sekolah dengan lebih baik daripada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Studi ini berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan penggunaan bahasa dan praktik pedagogis di sekolah dan di rumah bagi keluarga mampu, sedangkan hal sebaliknya dialami oleh keluarga tidak mampu. Priyono merekomendasikan pengembangan bahan ajar PAUD dan program pendidikan orang tua yang dapat mengurangi kesenjangan ini.

Artikel kelima oleh Lilik Kustiyah *et al.* mengungkap bahwa gizi seimbang bagi anak sejak usia dini berdampak pada pendidikan mereka sehingga isu ini harus disikapi melalui prakarsa pengembangan anak usia dini seperti lembaga PAUD. Studi ini dilakukan selama dua tahun di dua kecamatan di Bogor dan melibatkan sepuluh lembaga PAUD. Studi ini juga menemukan bahwa pengetahuan kader PAUD tentang gizi seimbang perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, pengetahuan tentang gizi seimbang harus diintegrasikan ke dalam bahan ajar di lembaga PAUD.

Kami berharap bahwa studi-studi yang dipresentasikan dalam seminar akan menjadi pengetahuan berguna bagi pembaca. Buletin ini merupakan salah satu dari serangkaian publikasi kerja sama antara UNICEF dan SMERU khusus untuk isu anak di Indonesia. Selain itu, untuk lebih mengembangkan proses berbagi pengetahuan antara peneliti dan pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam isu anak, buletin ini telah ditautkan dengan Jaringan Peduli Anak Indonesia (JPAI) berikut situs jaringannya untuk penjangkauan dan diseminasi yang lebih luas. Akhirnya, UNICEF mengucapkan selamat sekaligus terima kasih kepada SMERU atas upaya, komitmen, dan kemitraannya. Kami juga berharap agar kerja sama ini terus berlanjut guna memperkuat pengetahuan berbasis bukti tentang isu anak di Indonesia. ■

however, better test results were only apparent in junior high school students' national examination. The study also found that in both elementary and junior high schools, the BOS funds are more effective if distributed through schools than directly individual to students.

The fourth study by Priyono discusses cultural capital and school readiness in connection with early childhood education in Banten. The study highlights the differences in children's educational practices across the various social classes in the region and argues that parents' educational background has a definite correlation with school readiness. According to the teachers interviewed, children from advantaged families fared better at comprehending instructions in school compared to those from disadvantaged families. The study argues that this was a result of the similarities between language and pedagogical practices meted out at school and at home, while the opposite is experienced in marginalized families. Priyono recommends the development of early childhood education materials and parental education programs that could narrow the gaps.

The fifth article by Lilik Kustiyah et al. reveals that balanced nutrition for children since their early age has an impact on their education, and hence this issue should be addressed through early childhood development initiatives such as the PAUD. The study was conducted over two years in two kecamatan (subdistricts) of Bogor and involved ten PAUD institutions. The study also found that the PAUD cadre's knowledge on balanced nutrition needed improvement and therefore knowledge on balanced nutrition should be integrated into the teaching materials at the PAUD centers.

We hope that the studies presented at the seminar will serve as useful knowledge to the readers. This newsletter is one of a series of publications focusing on the issue of child rights in Indonesia for which UNICEF and SMERU have been working closely together. Moreover, to foster the sharing of knowledge between researchers and stakeholders working on children's issues, this newsletter has been linked to the Jaringan Peduli Anak Indonesia (JPAI) network and its website for broader coverage and dissemination. Finally, UNICEF would like to congratulate and thank SMERU for its efforts, commitment, and partnership and we hope that we can continue to work together to strengthen evidence-based knowledge on children's issues in Indonesia. ■



PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PULAU TERPENCIL: KASUS PROGRAM SRA DI SEKOLAH-SEKOLAH DASAR KABUPATEN LEMBATA, NTT

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN REMOTE AREAS: THE CASE OF THE SRA PROGRAM IN THE ELEMENTARY SCHOOLS OF KABUPATEN LEMBATA, NTT

H.A.R. Tilaar, Sutjipto & Santoso Sri Handoyo*



Hasihui/SMERU

Pendahuluan

Sebuah evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN) 2012, kualitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati peringkat terendah di Indonesia. Lembata merupakan sebuah kabupaten di NTT yang dianggap sangat membutuhkan bantuan di bidang pendidikan karena sebagai daerah baru (hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Flores Timur) Lembata masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan sektor pendidikan. Selain itu, baik perhatian maupun partisipasi pemangku kepentingan sekolah setempat (guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, dan instansi pemerintah terkait) masih sangat rendah.

* H.A.R. Tilaar, Sutjipto & Santoso Sri Handoyo adalah peneliti dari Plan Indonesia.

Introduction

An evaluation conducted by the Ministry of Education and Culture showed that based on the results of the 2012 National Examination (UN), the quality of education in the Province of East Nusa Tenggara (NTT) ranked lowest in Indonesia. Lembata is a kabupaten (district) in NTT which is considered in dire need of assistance in the education area because being a new region (it was previously part of Kabupaten Flores Timur), Lembata still lags far behind on the development of its education sector. Aside from this, the attention from and participation of school stakeholders (teachers, students, students' parents, school committees, the community, and relevant government agencies) are seriously lacking.

* H.A.R. Tilaar, Sutjipto & Santoso Sri Handoyo are researchers at Plan Indonesia.

Tabel 1. Jumlah TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Lembata, NTT, menurut Kecamatan/
 Tabel 1. Number of Kindergartens (TK/RA)^a, Elementary Schools (SD/MI)^b, and Junior High Schools (SMP/MTs)^c in Kabupaten Lembata, NTT, according to Kecamatan (Subdistrict)

Kecamatan	TK/RA	SD	MI	Total	SMP	MTs	Total
Kecamatan Nagawutung	7	16	0	16	4	0	4
Kecamatan Atade	4	20	0	20	3	0	3
Kecamatan Ile Ape	6	22	0	22	5	0	5
Kecamatan Ile Ape Timur							
Kecamatan Lebatukan	4	18	0	18	4	0	4
Kecamatan Nubatukan	11	26	1	25	8	1	9
Kecamatan Omesuri	4	18	6	24	3	1	4
Kecamatan Buyasuri	9	20	8	28	4	2	6
Kecamatan Wulandoni	12	16	1	17	3	0	3
TOTAL	57	156	16	172	34	4	38

Sumber/Source: Pemerintah Kabupaten Lembata, n.d. untuk TK/RA; Biro Pusat Statistik, 2010 untuk SD/MI dan SMP/MTs/Pemerintah Kabupaten Lembata, n.d. for TK/RA; Biro Pusat Statistik, 2010 for SD/MI and SMP/MTs.

Keterangan/Note: Kecamatan Ile Ape Timur merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Ile Ape/Kecamatan Ile Ape Timur was previously part of Kabupaten Ile Ape.

^a TK = taman kanak-kanak/kindergarten, RA= raudatul atfal/Islamic kindergarten.

^b SD = sekolah dasar/elementary school, MI = madrasah ibtidaiah/Islamic elementary school.

^c SMP = sekolah menengah pertama/junior high school, MTs = madrasah sanawiah/Islamic junior high school.

Secara administratif, dari 1958 sampai 1999, Pulau Lembata merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 1999, Pulau Lembata secara resmi berdiri sendiri menjadi Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 1999.

Pada 2009, penduduk Kabupaten Lembata berjumlah 112.952 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing 60.414 dan 52.538 jiwa (Biro Pusat Statistik, 2010). Kelompok usia 7–12 tahun, yaitu usia sekolah dasar (SD), berjumlah 13.159 jiwa, sedangkan kelompok usia 13–16 tahun yang merupakan usia sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 5.987 jiwa. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, terdapat 57 taman kanak-kanak (TK)/raudatul atfal (RA), 172 SD/madrasah ibtidaiah (MI), dan 38 SMP/madrasah sanawiah (MTs) di Kabupaten Lembata.

Sejak 2008, Plan, sebuah LSM internasional, sudah berupaya memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Lembata dengan menerapkan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menggunakan metode Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). Program ini dilakukan di enam SD percontohan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Lebatukan. Keenam SD percontohan tersebut adalah SD Waienga, SD Hadakewa, SD Lerahinga, SD Kimakam, SD Lelawerang, dan SD Tanahtareket.

Menurut Plan, implementasi SRA dianggap berhasil di keenam SD percontohan tersebut berdasarkan indikator-indikator berikut: (i) kasus kekerasan di sekolah menurun drastis, (ii) guru-guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, (iii) peran serta masyarakat cukup baik dalam peningkatan kualitas

From 1958 to 1999, Lembata Island was administratively part of Kabupaten Flores Timur. Based on Law No. 52/1999, Lembata Island officially became autonomous as Kabupaten Lembata on 12 October 1999.

In 2009, Kabupaten Lembata's population were 112,952, with male and female populations of 60,414 and 52,538 respectively (Biro Pusat Statistik, 2010). The population belonging to the elementary school age group, 7–12 years old, consisted of 13,159 children, while 5,987 belonged to the junior high school age group, 13–16 years old. As shown in Table 1, there were 57 kindergartens, 172 elementary schools, and 38 junior high schools in Kabupaten Lembata.

Since 2008, Plan, an international NGO, has made efforts to provide assistance to improve the quality of elementary education in Kabupaten Lembata by implementing the Child-Friendly School (SRA) program, which adopts the Active, Creative, Effective, and Fun Learning (PAKEM) method. This program was conducted in six pilot elementary schools in two kecamatan, Kecamatan Ile Ape and Kecamatan Lebatukan. The six pilot elementary schools were SD Waienga, SD Hadakewa, SD Lerahinga, SD Kimakam, SD Lelawerang, and SD Tanahtareket.

According to Plan, SRA has been successfully implemented in the six pilot elementary schools based on the following indicators: (i) cases of violence in the schools have drastically decreased, (ii) teachers apply fun learning in the classroom, (iii) community participation in the improvement of the quality of the schools is quite good, and (iv) school principals implement a more transparent and participatory

Tabel 2. Kecamatan dan Sekolah Sampel /Table 2. Kecamatan and Sample Schools

Kecamatan	Jumlah Sekolah/ Number of Schools	Keterangan/ Note
Kecamatan Ile Ape	2	Sekolah percontohan/Pilot schools
Kecamatan Ile Ape Timur ^a		
Kecamatan Lebatukan	2	Sekolah percontohan/Pilot schools
Kecamatan Atadei	2	Sekolah replikasi/Replication schools
Kecamatan Wulandoni	2	Sekolah replikasi/Replication schools
Kecamatan Nubatukan	2	Sekolah replikasi/Replication schools
Kecamatan Omesuri	2	Sekolah replikasi/Replication schools
TOTAL	12	

^a Kecamatan Ile Ape Timur merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Ile Ape/Kecamatan Ile Ape Timur was previously part of Kabupaten Ile Ape.

sekolah, dan (iv) kepala sekolah menerapkan tata kelola sekolah yang lebih transparan dan partisipatoris. Plan telah menyampaikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) untuk mereplikasi model tata kelola sekolah seperti ini di sekolah-sekolah lain.

Tujuan dan Metodologi Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif tentang dampak intervensi (investasi) SRA yang telah diimplementasikan oleh Plan di sejumlah SD di Kabupaten Lembata, terutama pada sistem pembelajaran, sumber daya, dan tata kelola sekolah (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi).

Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi kelas, dan tes siswa. Penerapan PAKEM, kepemimpinan, tata kelola sekolah, serta peran, dukungan, dan kontribusi komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dianalisis dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu sangat baik, baik, hampir baik, hampir buruk, dan sangat buruk. Untuk menilai kemampuan akademis siswa, siswa diberi serangkaian tes Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sasaran penelitian meliputi 62 SD di 9 kecamatan yang terdiri atas 6 SD percontohan dan 56 sekolah replikasi. Untuk pertimbangan praktis, penelitian ini menggunakan sekolah sampel. Sekolah sampel terdiri atas 12 SD : 4 SD percontohan dan 8 sekolah replikasi. Sekolah-sekolah tersebut berlokasi di tujuh kecamatan seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Responden penelitian meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa kelas 4–6, komite sekolah, dan orang tua siswa.

Temuan Studi

1. Penerapan PAKEM

Secara umum, sekolah percontohan lebih berhasil daripada sekolah replikasi dalam penerapan PAKEM selama program

school governance. Plan has suggested for the replication of this model of school governance in other schools to the Education, Youth, and Sports (PPO) Agency.

Research Objective and Methodology

In general, this research aimed to obtain comprehensive information on the impact of the SRA intervention (investment) that Plan has implemented in a number of elementary schools in Kabupaten Lembata, particularly on the learning system, resources, and school governance (transparency, accountability, and participation).

Data was collected through questionnaires, interviews, class observations, and students' tests. The application of PAKEM, school leadership, school governance, and the role, support, and contribution of school committees, parents, and the community were analyzed using the Likert scale, comprising five categories: very good, good, almost good, almost bad, and very bad. To assess the academic competency of the students, a set of tests on Indonesian, math, and science was given.

The research targeted 62 elementary schools across 9 kecamatan, which consisted of 6 pilot elementary schools and 56 replication schools. For practical reasons, this research used a sample of schools. The sample included 12 elementary schools, which comprised 4 pilot schools and 8 replication schools. These schools are located in seven kecamatan as shown in Table 2. The respondents included school supervisors, school principals, teachers, students in grades four to six, school committees, and students' parents.

Findings of the Study

1. The Application of PAKEM

In general, the pilot schools were more successful than the replication schools in the application of the PAKEM method

SRA. Guru memainkan peran yang paling menentukan dalam keberhasilan penerapan PAKEM dibandingkan dengan para pemangku kepentingan sekolah lain. Karena peran guru sangat strategis dalam penerapan PAKEM, peran pemangku kepentingan lain perlu diarahkan untuk meningkatkan karakter dan kompetensi guru.

2. Kepemimpinan dan Tata kelola Sekolah

Berdasarkan persepsi guru, rata tingkat transparansi kepala sekolah di sekolah percontohan sedikit lebih baik daripada di sekolah replikasi. Kompetensi kepala sekolah baik di sekolah percontohan maupun di sekolah replikasi dianggap baik. Dalam hal tata kelola sekolah, para responden (guru, komite sekolah, orang tua, dan pengawas sekolah) menilai bahwa rata-rata sekolah percontohan lebih baik daripada sekolah replikasi.

3. Peran, Dukungan, dan Kontribusi Komite Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan SRA

Komite sekolah adalah institusi penting yang dibentuk untuk menjadi mitra sekolah dalam mengembangkan sekolah. Secara umum, komite sekolah berperan sebagai

- memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan,
- memberi dukungan dalam bentuk finansial, pemikiran, dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan,
- pengontrol yang memastikan berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan, berikut keluarannya, di tingkat satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel, dan
- mediator antara pemerintah (lembaga eksekutif) dan masyarakat di tingkat satuan pendidikan.

Para pemangku kepentingan di sekolah percontohan, terutama orang tua, menjalankan peran yang relatif lebih baik daripada pemangku kepentingan di sekolah replikasi. Di sekolah replikasi, tidak ada upaya-upaya terstruktur yang dirancang oleh sekolah untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan, terutama orang tua, dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung pembelajaran siswa baik di rumah maupun di sekolah.

4. Peran, Dukungan, dan Kontribusi Dinas PPO/UPTD dan Pengawas Sekolah dalam Pelaksanaan SRA

Menurut persepsi guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, dua peran paling menonjol dari Dinas PPO/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pengawas sekolah adalah sebagai pengontrol dan pemberi pertimbangan. Meskipun peran mereka sebagai pendukung dan mediator sangat kecil, Dinas PPO/UPTD dan pengawas sekolah secara umum telah memainkan peran yang baik dalam mendukung pelaksanaan Program SRA.

during the SRA program. Teachers played the most determining role in this success compared to the other school stakeholders. Because of teachers' strategic role in this application, the role of other stakeholders needs to be directed towards improving teachers' character and competency.

2. School Leadership and Governance

Based on the perception of teachers, the average level of transparency of school principals in the pilot schools is slightly better than that in the replication schools. The competency of school principals in both the pilot and replication schools is perceived as being good. In terms of school governance, respondents (teachers, school committees, parents, and school supervisors) perceived that on average the pilot schools were better than the replication schools.

3. Role, Support, and Contribution of the School Committees, Parents, and the Community in the Implementation of SRA

The school committee is an important institution which is formed to be the school's partner in developing the school. In general, it plays the role of:

- advisory agency that gives advice in determining and executing education policies at the school level;
- supporting agency that provides financial, conceptual, and direct assistance in the implementation of education at the school level;
- controlling agency that ensures transparency and accountability in the implementation of education, as well as its output, at the school level; and
- mediator that mediates between the government (executive body) and the community at the school level.

Stakeholders in the pilot schools, especially parents, played their roles relatively better than those in the replication schools. In the replication schools, there were no structured efforts made by the school to optimize the roles of stakeholders, particularly parents, in activities to support students' learning both at home and in school.

4. Role, Support, and Contribution of the PPO Agency/UPTD and School Supervisor in the Implementation of SRA

According to the perception of teachers, school principals, and school committees, the two most prominent roles of the PPO Agency/Regional Technical Implementing Unit (UPTD) and school supervisors hold the controlling and advisory roles. Although their roles as the supporting agency and mediator were very small, the PPO Agency/UPTD and school supervisors had generally played a good role in supporting the implementation of the SRA program.

5. Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar siswa di sekolah percontohan relatif lebih tinggi daripada di sekolah replikasi. Hal ini secara umum disebabkan oleh realitas bahwa pemangku kepentingan di sekolah percontohan menjalankan perannya dengan lebih baik daripada pemangku kepentingan di sekolah replikasi. Secara psikologis, kepala sekolah dan guru di sekolah percontohan merasa memiliki tanggung jawab lebih besar atas hasil belajar siswa daripada kepala sekolah dan guru di sekolah replikasi karena label “sekolah percontohan” yang menempel pada sekolah mereka.

Analisis dan Diskusi

Berdasarkan persepsi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, serta hasil pengamatan lapangan, walaupun masih ada aspek-aspek PAKEM yang belum diterapkan dengan baik di kedua kelompok sekolah, kualitas penerapan PAKEM di sekolah percontohan relatif lebih baik daripada di sekolah replikasi. Paling tidak, ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut: (i) sekolah percontohan lebih berpengalaman dalam menerapkan PAKEM daripada sekolah replikasi karena mereka mendapatkan kesempatan lebih awal dalam menerapkannya, dan (ii) kegiatan pembelajaran siswa dan peran orang tua siswa dalam menunjang penerapan PAKEM di sekolah percontohan lebih baik daripada di sekolah replikasi. Menurut Zammuto, Keaveney, dan O'Connor (1996), apabila suatu organisasi secara teratur memberikan jasa yang melebihi ekspektasi pelanggannya, jasa tersebut dinilai berkualitas.

Mayer, Mullens, dan Moore (2000) menyimpulkan dalam studi mereka bahwa kualitas sekolah memengaruhi pembelajaran siswa melalui tingkat pendidikan dan keterampilan guru. Hasil studi kami menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam kelas, serta kultur dan iklim organisasi sekolah, memengaruhi keberhasilan penerapan PAKEM.

Para pakar dan praktisi pendidikan sepakat bahwa hasil pendidikan adalah kompetensi yang siswa kembangkan. Melalui pendidikan, siswa diharapkan dapat mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor (Bloom et al., 1956). Di Kabupaten Lembata, hasil tes Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA siswa SD kelas 4, 5, dan 6 menunjukkan tingkat kompetensi yang rendah. Prestasi belajar siswa yang rendah tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang salah satunya adalah kompetensi guru yang tidak memadai (Burrup, 1967) dan hal ini merupakan masalah utama di Kabupaten Lembata. Guru-guru setempat tidak memenuhi standar guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007.

5. Students' Academic Achievement

Students' academic achievement in the pilot schools is relatively higher than that in the replication schools. This is generally due to the fact that the stakeholders in the pilot schools carried out their roles better than those in the replication schools. Psychologically, school principals and teachers in the pilot schools felt more responsible for students' outcome than those in the replication schools because of the “pilot school” label attached to their schools.

Analysis and Discussion

Based on the perceptions of teachers, school principals, and school supervisors, as well as the results of the field observations, although there are aspects of PAKEM that have not been applied well in both groups of schools, the quality of PAKEM application in the pilot schools is relatively better than that in the replication schools. At least, there are two reasons leading to this: (i) the pilot schools are more experienced in applying PAKEM than the replication schools, as they had received an earlier opportunity to apply the method than the replication schools did, and (ii) students' learning activities and the role of parents in supporting the application of PAKEM in the pilot schools are better than those in the replication schools. According to Zammuto, Keaveney, and O'Connor (1996), when an organization provides services that exceed the expectations of its customers on a regular basis, the services are considered quality services.

Mayer, Mullens, and Moore (2000) concluded in their study that the quality of the school affects the learning process of the students through the level of education and skills of the teachers. Our study shows that what happens in the classroom, as well as the school's culture and organizational climate, influence the successful application of PAKEM.

Education experts and practitioners are in agreement that the outcome of education is the competency that students develop. Through education, students are expected to be able to develop their cognitive, affective, and psychomotor competencies (Bloom et al., 1956). In Kabupaten Lembata, the test results of elementary school students in grades four to six in Indonesian, math, and science show a low level of competency. The students' low academic achievement could have been caused by a number of factors, one of which is the teachers' inadequate competency (Burrup, 1967), and this is in fact a major issue in Kabupaten Lembata. The teachers do not meet the professional standard as mandated in Regulation of the National Minister for Education (Permendiknas) No. 16/2007.

Kepemimpinan dan tata kelola sekolah merupakan faktor-faktor yang juga memengaruhi kualitas pendidikan. Hersey dan Blanchard (1969) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan konsep yang tidak hanya berkaitan erat dengan kinerja objektif seorang pemimpin tetapi juga dengan hal-hal seperti sumber daya manusia dan kondisi psikologis organisasi; dengan kata lain, aspek-aspek tata kelola organisasi. Dengan demikian, kompetensi kepala sekolah—yang meliputi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial—dan transparansi manajemen sekolah memainkan peran penting dalam kepemimpinan yang efektif. Transparansi tersebut harus sudah dikembangkan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah di bawah pemantauan dan pengawasan pihak yang berwenang. Walau hasil studi menunjukkan bahwa secara umum tingkat transparansi tata kelola sekolah baik di sekolah percontohan maupun sekolah replikasi lebih rendah daripada tingkat kompetensi kepala sekolah, data menunjukkan bahwa kedua aspek berada pada tingkat yang baik. Hal ini pada gilirannya menghasilkan tata kelola sekolah yang baik.

Peran pemangku kepentingan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa (Shaeffer, 1994). Namun, secara umum, peran pemangku kepentingan di sekolah sampel belum signifikan. Di sisi lain, Colletta dan Perkins (1995) memberikan contoh partisipasi masyarakat dalam bentuk peran serta anggota masyarakat dalam penelitian dan pengumpulan data; kesertaan mereka dalam dialog-dialog dengan pembuat kebijakan; dan keterlibatan mereka dalam manajemen sekolah, penyusunan kurikulum, pengembangan mata pelajaran, dan pembangunan fisik sekolah. Temuan studi menunjukkan bahwa peran yang dijalankan Dinas PPO/UPTD dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lembata konsisten dengan uraian Colletta dan Perkins tentang partisipasi masyarakat.

School leadership and governance are factors which also affect the quality of education. Hersey and Blanchard (1969) stated that leadership is a concept that is not only closely related to a leader's objective performance but also to such things as the human resources and psychological conditions of an organization; in other words, the governance aspects of the organization. Thus, a school principal's competencies—personality, managerial, entrepreneurial, supervisory and social competencies—and transparency in the management of the school play an important role in effective leadership. Moreover, school governance transparency should be developed starting from the planning stage to the implementation stage by involving all school stakeholders under the monitoring and supervision of the authorities. Although the results of the study show that in general the degree of transparency of the school governance both in the pilot and replication schools is lower than the competency level of the school principal, data shows that both aspects are at a good level. This in turn results in a good school governance.

The role of school stakeholders in the implementation of education activities is one factor that affects students' academic achievement (Shaeffer, 1994). However, in general, the role of stakeholders in the sample schools is not significant. On the other hand, Colletta and Perkins (1995) gave examples of community participation in the form of community members taking part in research and data collection; engaging themselves in dialogs with policymakers; and being involved in the school management, the design of curricula, the development of school subjects, and the physical construction of the school. Findings of the study show that the role played by policymakers (the PPO Agency/UPTD) in the implementation of education activities in Kabupaten Lembata was consistent with what was outlined as community participation by Colletta and Perkins.

Berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN) 2012, kualitas pendidikan di Provinsi NTT menempati peringkat terendah di Indonesia.

Based on the results of the 2012 National Examination (UN), the quality of education in the Province of East Nusa Tenggara (NTT) ranked lowest in Indonesia.



Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah sintesis yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Lembata belum mencapai kondisi ideal. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PAKEM, hasil belajar siswa, dan peran masyarakat dan orang tua belum optimal. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil UN para siswa di Provinsi NTT dalam dua tahun terakhir yang berada pada peringkat terendah di seluruh Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami mengusulkan beberapa rekomendasi berikut.

1. Tingkatkan Kualitas Penerapan Metode PAKEM

Penerapan PAKEM di SD, yang dapat mendorong terjadinya perubahan pada cara berpikir, sikap, dan perilaku siswa, membutuhkan pemahaman dari orang tua mereka. Siswa akan mengajukan pertanyaan secara aktif dan menjadi kritis terhadap banyak hal. Oleh karena itu, pihak sekolah dan Dinas PPO/UPTD Kabupaten Lembata perlu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai aspek-aspek positif dari perubahan tersebut sehingga transformasi budaya dapat terjadi pada kedua belah pihak, baik para siswa maupun orang tua mereka.

2. Tingkatkan Peran Pemangku Kepentingan melalui Program SRA

Melalui pelaksanaan program SRA, Dinas PPO Kabupaten Lembata dapat meningkatkan peran pemangku kepentingan sekolah, khususnya pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru di sekolah-sekolah yang belum melaksanakan program ini.

3. Tingkatkan Prestasi Belajar Siswa

Penerapan PAKEM harus menjamin prestasi akademis yang baik dari para siswa karena mereka harus mengikuti UN, yang merupakan standar nasional kompetensi siswa. Untuk itu, perhatian perlu difokuskan pada perbaikan terhadap aspek-aspek berikut: (i) kompetensi profesional guru, (ii) proses pembelajaran, (iii) motivasi belajar siswa, dan (iv) peran kepala sekolah dalam penerapan disiplin di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

4. Tingkatkan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Lembata, melalui institusi-institusinya seperti Dinas PPO/UPTD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lembaga terkait lainnya, perlu berupaya untuk menjamin kesinambungan Program SRA. Untuk itu, alokasi APBD Kabupaten Lembata untuk sektor pendidikan harus ditingkatkan, sementara peran serta berbagai pihak terkait

Based on the discussion above, a synthesis can be drawn to show that the implementation of elementary education in Kabupaten Lembata has not reached the ideal condition. This conclusion is based on the data which shows that the application of the PAKEM method, students' learning outcome, and the role of the community and parents are not optimum. This conclusion is confirmed by the UN results in the past two years where the Province of NTT has scored the lowest throughout Indonesia.

Recommendations

Based on the conclusion, we propose the following recommendations.

1. Improve the Application Quality of the PAKEM Method

The application of PAKEM in elementary schools, which can encourage changes in students' way of thinking, attitude, and behavior, requires the understanding of their parents. Students will actively ask questions and become critical of many things. Therefore, the school and the PPO Agency/UPTD of Kabupaten Lembata need to brief students' parents about the positive aspects of these changes so that the cultural transformation occurs on both the students and their parents.

2. Increase the Stakeholders' Role through the SRA Program

Through the implementation of the SRA program, the PPO Agency of Kabupaten Lembata can increase the role of school stakeholders, particularly school supervisors, principals, and teachers in schools that have not implemented this program.

3. Increase Students' Academic Achievement

The application of PAKEM should ensure students' good academic achievement because they will have to take the UN, which is the national standard for students' competency. For this purpose, attention needs to be focused on the improvement of the following aspects: (i) teachers' professional competency, (ii) learning processes, (iii) students' learning motivation, and (iv) principals' role in ensuring the enforcement of discipline among all parties involved in the learning process.

4. Increase the Role of the Local Government

The Kabupaten Lembata Government, through its institutions such as the PPO Agency/UPTD, Regional Development Planning Board (Bappeda), and other relevant institutions, needs to make efforts to ensure the sustainability of the SRA program. For this purpose, the allocation of the Kabupaten Lembata Budget (APBD) for the education sector should be increased, while the participation of various concerned parties should be encouraged. Ensuring the sustainability of the SRA program means that

perlu didorong. Dengan menjamin kesinambungan program SRA, kualitas pendidikan akan meningkat. Dengan peningkatan ini, transformasi budaya akan berlangsung karena pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu agen perubahan budaya masyarakat. ■

DAFTAR ACUAN

- Biro Pusat Statistik (2010) *Lembata dalam Angka 2010*. Kabupaten Lembata: Biro Pusat Statistik.
- Bloom, Benjamin S. (ed.), Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walter H. Hill, dan David R. Krathwohl (1956) *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals* [Taksonomi Tujuan Pendidikan: Klasifikasi Tujuan-Tujuan Pendidikan]. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay.
- Burru, Percy E. (1967) *The Teacher and the Public School System* [Guru dan Sistem Sekolah Negeri]. New York: Harper and Row.
- Colletta, Nat J. dan Gillian Perkins (1995) 'Participation in Education' [Partisipasi dalam Pendidikan]. Environment Department Papers, Participation Series, Paper No. 001. Washington, D.C.: The World Bank.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard (1969) 'The Life Cycle Theory of Leadership' [Teori Siklus Hidup Kepemimpinan]. *Training and Development Journal* 23 (5): 26–34.
- Mayer, Daniel P., John E. Mullens, dan Marry T. Moore (2000) 'Monitoring School Quality: An Indicators Report' [Memantau Kualitas Sekolah: Laporan Indikator]. Washington, D.C.: National Center for Education Statistics.
- Pemerintah Kabupaten Lembata (n.d.) *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lembata* [dalam jaringan] <<http://www.lembatakab.go.id/html/TK/htm>>.
- Shaeffer, Sheldon (1994) *Participation for Educational Change: A Synthesis of Experience* [Partisipasi dalam Perubahan Pendidikan: Sebuah Sintesa Pengalaman]. Paris: International Institute for Educational Planning.
- Zammuto, Raymond F., Susan M. Keaveney, dan Edward J. O'Connor (1996) 'Rethinking Student Services: Assessing and Improving Service Quality' [Memikirkan Kembali Layanan Siswa: Menilai dan Memperbaiki Kualitas Layanan]. *The Journal of Marketing in Higher Education* 7 (1): 45–69.

the quality of education will improve. With this improvement, cultural transformation will take place, as education is basically one of the agents of change of the society's culture. ■

LIST OF REFERENCES

- Biro Pusat Statistik (2010) *Lembata dalam Angka 2010* [Lembata in Figures 2010]. Kabupaten Lembata: Statistics Indonesia.
- Bloom, Benjamin S. (ed.), Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walter H. Hill, and David R. Krathwohl (1956) *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay.
- Burru, Percy E. (1967) *The Teacher and the Public School System*. New York: Harper and Row.
- Colletta, Nat J. and Gillian Perkins (1995) "Participation in Education." Environment Department Papers, Participation Series, Paper No. 001. Washington, D.C.: The World Bank.
- Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard (1969) "The Life Cycle Theory of Leadership." *Training and Development Journal* 23 (5): 26–34.
- Mayer, Daniel P., John E. Mullens, and Marry T. Moore (2000) 'Monitoring School Quality: An Indicators Report.' Washington, D.C.: National Center for Education Statistics.
- Shaeffer, Sheldon (1994) *Participation for Educational Change: A Synthesis of Experience*. Paris: International Institute for Educational Planning.
- Pemerintah Kabupaten Lembata (n.d.) *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lembata* [Official Website of the Government of Kabupaten Lembata] [online] <<http://www.lembatakab.go.id/html/TK/htm>>.
- Zammuto, Raymond F., Susan M. Keaveney, and Edward J. O'Connor (1996) 'Rethinking Student Services: Assessing and Improving Service Quality.' *The Journal of Marketing in Higher Education* 7 (1): 45–69.



KESIAPAN BERSEKOLAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

SCHOOL READINESS AND THE INFLUENCING FACTORS

Weny Savitry S. Pandia, Yapina Widyawati, Ancilla Y. S. Irwan & Irwanto*



Hamnah Smith/SMERU

Pendahuluan

Di banyak negara, kebijakan terkait pengembangan anak usia dini atau ECD (*early childhood development*) dipandang sebagai salah satu cara efektif memberantas kemiskinan. Di Indonesia, baru setelah era reformasi, kebijakan pembangunan nasional secara eksplisit difokuskan pada anak usia dini (0–6 tahun). Mulai 2006 telah dikembangkan model ECD holistik yang berkualitas, berbasis komunitas, dan terjangkau harganya oleh masyarakat. Dalam perspektif pembangunan nasional, sangat penting memandang ECD sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan (NSCDC, 2007).

ECD holistik tersebut diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten sesuai dengan konteks perdesaan dan komunitas miskin di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti pendidikan dasar dengan tingkat kesiapan bersekolah yang memadai. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengulangan kelas dan putus sekolah siswa kelas satu dan dua sekolah dasar (SD) semakin berkurang.

* Para penulis adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Introduction

In many countries, policies related to early childhood development, or ECD, are seen as an effective way to reduce poverty. In Indonesia, it was not until the reform era did national development policies explicitly focus on early age children (0–6 years old). Since 2006, a holistic model of the ECD program, which is of high quality, community based, and affordable for the society, has been developed. From the perspective of national development, it is crucial to view ECD as part of the strategy towards sustainable community and economic development (NSCDC, 2007).

The holistic ECE is conducted at both provincial and kabupaten (district) levels, in accordance with the contexts of rural areas and poor communities in Indonesia. It is aimed at preparing children so that they are sufficiently ready to join formal basic education. This will hopefully reduce the proportions of first-grade and second-grade students failing their class and dropping out of school.

* The writers are lecturers at the Faculty of Psychology of Atma Jaya Catholic University of Indonesia.

Dalam rangka pengembangan ECD, serangkaian aktivitas telah dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat seperti advokasi bagi pihak-pihak terkait, pelatihan bagi pelatih utama, pelatihan KAP (*knowledge, attitude, and practices*/pengetahuan, sikap, dan perilaku) bagi peneliti, dan pengembangan materi pelatihan. Seiring kebijakan desentralisasi, aktivitas di atas ditindaklanjuti dengan diadakannya kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat dikembangkan model ECD yang komprehensif.

Pengembangan program ECD perlu dibedakan dengan pengembangan program pendidikan anak usia dini (PAUD) atau *early childhood education* (ECE). Program ECD secara umum mengacu pada berbagai intervensi (kesehatan, gizi, dan pendidikan) dengan target anak di bawah usia 8 tahun. Para praktisi ECD yakin bahwa berbagai pengalaman positif dan asupan gizi yang baik selama masa awal kanak-kanak akan memengaruhi perkembangan otak, kesehatan fisik secara umum, dan bagaimana anak berhubungan dengan orang lain. Intervensi dan perkembangan positif selama masa awal kanak-kanak terbukti berkorelasi positif dengan prestasi sekolah, produktivitas dalam belajar, ketangguhan, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat (NSCDC, 2007). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa minimnya perhatian dalam hal kesehatan dan pendidikan akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak selama masa perkembangannya yang sensitif (Jensen, 2009; Coley, 2002). Oleh karena itu, program ECD tidak hanya membidik sektor pendidikan, tetapi merupakan intervensi lintas sektoral. Program ECD yang baik seharusnya juga dapat memberikan akses layanan kesehatan sehingga membantu anak memperoleh layanan kesehatan yang baik, misalnya melalui posyandu.

Sementara itu, ECE merupakan komponen penting dari ECD. ECE memberikan pengalaman belajar tidak terstruktur pada anak usia dini sehingga mereka dapat mempelajari berbagai kemampuan skolastik dan sosial, serta keterampilan hidup lain yang kelak dibutuhkan di jenjang pendidikan formal. Terkait dengan hal ini, kesiapan bersekolah merupakan salah satu pencapaian penting program ECE dan ECD.

Kajian-kajian terkini menyarankan agar kesiapan bersekolah diperlakukan sebagai sebuah konsep sistemik. Oleh karena itu, kesiapan bersekolah harus mencakup (i) kesiapan anak untuk memulai sekolah, (ii) kesiapan pihak sekolah, dan (iii) kapasitas dan komitmen keluarga dan komunitas untuk menyediakan kesempatan bagi anak sedari kecil (Centre for Community Child Health, 2008).

Setelah empat tahun pelaksanaan program ECD di beberapa kabupaten, sebuah studi dilakukan untuk menyimpulkan keberhasilan yang telah dicapai dan tantangan yang dihadapi melalui penilaian kesiapan bersekolah anak. Bagian berikut menguraikan hasil studi tersebut.

A series of activities such as advocacy, training for master trainers, training of KAP (knowledge, attitude, and practices) for researchers, and development of training materials have been conducted at the national level. With respect to the decentralization policy, those activities were followed up at the provincial and kabupaten levels so that a comprehensive ECD model can be created.

Efforts to develop ECD programs should be distinguished from those to develop early childhood education (ECE) programs. In general, the ECD program refers to the various interventions (health, nutrition, and education) targeted at children under the age of eight. ECD practitioners believe that positive experiences and good nutrient intake during early childhood will positively affect children's brain development and general physical health, as well as the way they interact with others. Positive interventions and development during early childhood prove to correlate positively with better academic achievement, learning productivity, hardiness, and sense of responsibility as community members (NSCDC, 2007). Various research efforts have revealed that lack of attention towards health and education during the sensitive stage of early childhood development would negatively affect children's development (Jensen, 2009; Coley, 2002). Therefore, it is important to view ECD programs as an intersectoral intervention instead of merely an intervention exclusively made in the education sector. A good ECD program should also be able to provide children with access to good health services, for example, at a posyandu (integrated health service post).

Meanwhile, ECE is an essential component of ECD. It provides unstructured learning experiences for young children in order that they can acquire various scholastic and social competencies, as well as other life skills, which they will later need when they enroll in formal education. In this regard, school readiness is one important achievement of the ECE and ECD programs.

Recent studies suggest that school readiness be treated as a systemic concept. Therefore, school readiness must include (i) children's readiness to enter school, (ii) the readiness of the school, and (iii) the capacity of and commitment from the family and community to provide opportunities for children from the very beginning (Centre for Community Child Health, 2008).

Four years after the ECD program was launched in a number of kabupaten, an assessment of its achievement and challenges through an evaluation of school readiness was conducted. The next sections discuss the results of the assessment.



Tujuan, Metodologi, dan Wilayah Studi

Penelitian ini bertujuan (i) mengukur pengaruh aktivitas ECD saat ini pada kesiapan anak-anak untuk duduk di kelas satu SD, (ii) mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kapasitas keluarga dan sekolah (guru dan lingkungan sekolah) yang akhirnya dapat memengaruhi kesiapan anak untuk bersekolah, dan (iii) memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan dan menerapkan berbagai kebijakan terkait PAUD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Instrumen kuantitatif penelitian dirancang oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Instrumen ini mengukur kompetensi skolastik dan nonskolastik anak-anak kelas satu SD secara kuantitatif. Studi ini menambahkan variabel pengukuran kesehatan fisik dan kesejahteraan, faktor-faktor terkait karakteristik orang tua dan guru, dan indikator yang seharusnya dimiliki untuk mencapai lingkungan belajar-mengajar yang kondusif. Metode kualitatif mencakup observasi dan wawancara terhadap orang tua, guru, dan institusi pemerintahan setempat.

Kabupaten yang menjadi wilayah studi mencakup Aceh Besar, Pandeglang, Sukabumi, Wonosobo, Banyumas, Probolinggo, Bone, Lombok Tengah, Sikka, Belu, dan Jayapura. Responden terdiri atas 269 siswa kelas satu SD: 208 siswa memperoleh intervensi program ECD (kelompok ECD/perlakuan), sementara 61 siswa tidak memperoleh intervensi program ECD (kelompok non-ECD/kontrol). Kelompok intervensi (perlakuan) mencakup anak-anak yang pernah memperoleh intervensi usia dini, baik melalui taman posyandu, PAUD, atau lainnya. Sebaliknya, kelompok kontrol terdiri atas anak-anak yang bersekolah di SD yang sama namun tidak pernah memperoleh intervensi pendidikan usia dini dari institusi pendidikan apapun. Responden merupakan anak-anak yang baru pertama kali duduk di bangku kelas satu SD. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Analisis kuantitatif menggunakan analisis ragam satu arah (*one-way ANOVA*), *t-test*, *multiple regression*, dan korelasi.

Temuan Studi

Hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok ECD dan non-ECD pada semua subtes (non-skolastik, skolastik, dan kesiapan total). Secara umum, kinerja siswa pada penelitian ini cenderung mendekati angka maksimal. Pada subtes motorik kasar hampir semua siswa berhasil memperoleh nilai maksimal.

Siswa yang memperoleh intervensi program ECD dari taman kanak-kanak (TK) dan raudatul atfal (RA) memperoleh skor lebih tinggi daripada kelompok non-ECD pada semua subtes kesiapan bersekolah.

Objective, Methodology, and Study Areas

This research was conducted to (i) measure the effect of ECD activities on children's readiness to enter the first grade of elementary school, (ii) find out about and evaluate the factors that may influence the capacity of families and the school (teachers and school environment) which contribute to children's readiness to enter school, and (iii) provide input for policymakers in formulating and implementing policies related to ECE. This research employed quantitative and qualitative methods. The quantitative instruments were designed by the Center for Educational Evaluation (Puspendik) of the Ministry of National Education. The instruments measured the scholastic and non-scholastic competencies of first graders. There were also additional variables for measuring physical health and well-being, factors related to parents' and teachers' characteristics, and indicators that are prerequisite for conducive learning environment. The qualitative methods employed included observation and interviews with parents, teachers, and local government institutions.

*The study areas covered the following kabupaten (district): Aceh Besar, Pandeglang, Sukabumi, Wonosobo, Banyumas, Probolinggo, Bone, Lombok Tengah, Sikka, Belu, and Jayapura. The respondents consisted of 269 first graders: 208 of them have had ECD intervention (ECD/treatment group), while the other 61 did not (non-ECD/control group). The treatment group comprised first graders who had gone through early childhood education at a taman posyandu (posyandu kids center) or other ECE institutions, while the control group consisted of first graders from the same school who had never experienced early childhood education at any institution. All the respondents were new students on the first grade of elementary school. Using the simple random sampling method to obtain the sample, the research employed one-way analysis of variance (ANOVA), *t-test*, *multiple regression*, and *correlation* for quantitative analysis.*

Study Findings

The results of the one-way ANOVA test show that there are significant differences between the ECD and non-ECD groups on all subtests (non-scholastic, scholastic, and total readiness). Overall, students' performance in this research inclines to being close to the maximum score. On the gross motor activity subtest, almost all students got a maximum score.

Students who had experienced early childhood education at a kindergarten or Islamic kindergarten scored higher than those in the non-ECD group on all the school readiness subtests.

Tabel 1. Skor Rata-rata Perolehan Siswa Dalam Evaluasi Kesiapan Bersekolah per Kabupaten/ Table 1. Students' Mean Score in the School Readiness Evaluation in Each Kabupaten

Kabupaten	Pramembaca (maks. = 8)/ Pre-Reading (max = 8)	Pramenulis (maks. = 16)/ Pre-Writing (max = 16)	Pre- Matematika (maks. = 13)/ Pre-Math (max = 13)	Berbahasa (maks. = 10)/ Language (max = 10)	Memecahkan Masalah (maks. = 8)/ Problem Solving (max = 8)	Motorik Kasar (maks. = 2)/ Gross Motor (max = 2)	Total Skolastik (maks. = 57)/ Total Scholastic (max = 57)	Total Non- Skolastik (maks. = 33)/ Total Non- Scholastic (max = 33)	Total Kesiapan Sekolah (maks. = 90)/ Total School Readiness (max = 90)
Pandeglang	6,23	10,77	12,45	8,73	4,14	2,00	42,32	28,55	72,86
Sukabumi	7,14	13,14	12,67	8,81	5,29	2,00	47,05	31,19	80,24
Wonosobo	6,72	12,52	12,84	9,04	4,72	2,00	45,48	29,36	76,84
Banyumas	5,73	11,05	12,00	8,41	4,32	1,95	41,50	30,39	73,84
Probolinggo	6,96	12,26	12,44	9,26	5,22	2,00	46,15	28,96	77,11
Bone	6,33	11,05	12,76	9,00	5,81	2,00	44,95	29,86	76,81
Lombok Tengah	5,74	11,26	12,37	8,44	5,15	2,00	42,96	28,67	73,63
Sikka	5,48	11,08	12,64	8,36	4,04	2,00	41,60	28,28	71,88
Belu	5,16	11,44	12,28	9,20	2,96	2,00	41,04	27,58	70,62
Jayapura	6,00	10,19	12,04	9,19	4,81	2,00	42,23	29,53	73,76
Aceh Besar	5,93	9,68	11,61	8,79	4,71	2,00	40,71	29,70	72,41

■ = skor tertinggi/highest score. ■ = skor terendah/lowest score.

Persentase siswa yang berada di atas nilai rata-rata, nilai tengah, ataupun modus lebih banyak ditemui di kelompok ECD, baik PAUD maupun TK/RA. Pada skor total kesiapan sekolah, jumlah siswa dari kelompok PAUD dan TK/RA yang memperoleh skor di atas nilai rata-rata lebih dari 50%, sementara pada kelompok non-ECD hanya terdapat kurang dari 40% siswa dengan skor di atas nilai rata-rata.

Dengan menggunakan kategori rata-rata (*mean*) sebagai *cutting point*, terdapat 56,03% siswa PAUD dan 69,57% siswa TK/ RA yang dapat dikategorikan siap sekolah. Dari non-ECD, hanya 36,07% siswa yang dapat dikategorikan siap sekolah.

Faktor-faktor yang turut memengaruhi kesiapan bersekolah adalah:

a) Status Kesehatan Anak

Hasil studi menunjukkan korelasi signifikan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan skor total kesiapan bersekolah, total skolastik, pramembaca, dan pramenuis. Perbedaan rata-rata skor kesiapan ($p < 0,022$) dan skor skolastik ($p < 0,047$) signifikan antara anak yang diberi imunisasi lengkap (BCG, DPT, polio, hepatitis, dan campak) dengan anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap, terutama dalam memecahkan masalah. Imunisasi mencegah anak mengalami sakit sehingga memengaruhi kesempatan mereka dalam mendapatkan stimulasi optimal di usia dini.

b) Lama Mengikuti Program ECD

Siswa yang mengikuti program ECD selama paling sedikit 1,5 tahun menunjukkan hasil yang lebih baik secara signifikan pada semua subtes daripada mereka yang mengikuti program ECD dalam rentang waktu yang lebih pendek, kecuali pada subtes motorik kasar dan memecahkan masalah.

c) Penguasaan Bahasa Indonesia

Kemampuan berbahasa Indonesia memengaruhi keseluruhan kesiapan bersekolah anak, terutama skolastik. Nilai siswa yang lancar, tidak paham, atau paham berbahasa Indonesia berbeda secara signifikan pada subtes pramembaca, pramenuis, pra-Matematika, dan Berbahasa. Hal ini disebabkan kemampuan-kemampuan tersebut menuntut pemahaman Bahasa Indonesia sebagai pengantar instruksi.

d) Peranan Keluarga

Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di rumah belum optimal karena latar belakang pendidikan sebagian besar orang tua hanya sampai pendidikan dasar. Orang tua cenderung menyerahkan tanggung jawab membimbing anak belajar kepada saudara yang lebih tua (kakak).

Kesiapan bersekolah anak secara signifikan dipengaruhi jumlah tahun pendidikan bapak. Pada keluarga yang bapaknya memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang tinggi, kemungkinan

The proportion of students whose score was above the mean, median, and mode was higher among the respondents in the ECD group (both from the ECE institutions and kindergarten/Islamic kindergarten). More than 50% of the students from the ECD group scored above average on total school readiness, while less than 40% of the students from the non-ECD group did.

Using the mean category as the cutting point, 56.03% of ECE students and 69.57% of kindergarten/Islamic kindergarten students are ready to enter formal basic education, while only 36.07% of students from the non-ECD group are considered ready.

The following factors influence school readiness.

a) Children's Health Status

The findings show that there is a significant correlation between the body mass index (BMI) and the scores of total school readiness, total scholastic, pre-reading, and pre-writing. The mean difference between the scores of school readiness ($p < 0.022$) and scholastic ($p < 0.047$) is significant, especially in regard to problem solving, between children who have had complete vaccination (BCG, DTaP, IPV, HBV, and MMR)¹ and those who have not. Vaccination is given to children in an effort to make their body immune to certain diseases, thus affecting their chances of getting optimum stimuli at early ages.

b) Length of ECD Experience

Students who had had 1.5 years of experience in an ECE institution scored significantly higher on almost all the subtests—except on the subtests of gross motor and problem solving—than those who had less ECD experience.

c) The Indonesian Language Competency

Students' competency in Indonesian affect their overall school readiness, especially in the scholastic area. The scores of students who are fluent in, do not understand, and understand Indonesian are significantly different on the subtests of pre-reading, pre-writing, pre-math, and language. Those subjects require students' understanding of Indonesian used in the instructions.

d) Role of the Family

Parents' involvement in their children's learning at home is not optimal because most parents' only have basic educational background, so they usually devolve the responsibility of assisting their children to study at home upon the older siblings.

School readiness is significantly affected by the number of the father's schooling years. In families where fathers had attained a higher

¹ TBCG = Bacille Calmette Guerin vaccine for tuberculosis; DTaP = Diphtheria, Tetanus, and acellular Pertussis vaccine; IPV = Inactivated Poliovirus vaccine; HBV = Hepatitis B vaccine; MMR = measles, mumps, and rubella vaccine.

Tabel 2. Perbedaan Rata-rata Siswa yang Mengikuti Program ECD Berdasarkan Institusi/
 Tabel 2. Mean Differences of Students Following an ECD Program Based on Institution

Subtes/Subtest		Perbedaan Rata-rata/Mean Differences	
		PAUD/ECE Institutions	TK/ RA/Kindergarten/Islamic Kindergarten
Jumlah Partisipan (N)/Number of participants (N)		134	74
Total Kesiapan/ Total readiness	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	3,620 *	5,499 *
	Sig./Significance	0,003	0,000
Nonskolastik/ Non-scholastic	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,903 *	1,453 *
	Sig./Significance	0,028	0,002
Total Skolastik/ Total scholastic	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	2,718 *	4,060 *
	Sig./Significance	0,007	0,000
Pramembaca/ Pre-reading	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,608 *	0,688 *
	Sig./Significance	0,014	0,013
Pramenulis/ Pre-writing	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,833 **	1,544 *
	Sig./Significance	0,058	0,002
Pra-Matematika/ Pra-math	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,236	0,453 *
	Sig./Significance	0,153	0,015
Berbahasa/ Language	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,262 **	0,209
	Sig./Significance	0,090	0,225
Memecahkan Masalah/ Problem solving	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,845 **	1,166 *
	Sig./Significance	0,059	0,020
Motorik Kasar/ Gross motor	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,000	0,014
	Sig./Significance	1,000	0,201

* signifikan pada 10%/significant at 10%.
 ** signifikan pada 5%/significant at 5%.

anak mengalami proses belajar yang optimal di rumah juga lebih besar. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patrilineal.

Jumlah jam bekerja ibu berkorelasi positif terhadap kompetensi nonskolastik anak. Semakin banyak waktu ibu bekerja, semakin tinggi kompetensi nonskolastik anak. Karakteristik sosial-budaya masyarakat Indonesia yang kolektif membuka kesempatan masyarakat membantu anak mengembangkan potensinya. Walaupun ibu bekerja, tidak berarti anak-anak tidak menerima pengasuhan yang baik karena anak-anak dapat dititipkan kepada kerabat atau tetangga terdekat. Hal ini membuka kesempatan bersosialisasi anak sehingga kompetensi nonskolastik terasah sejak dini. Di sisi lain, di berbagai daerah ibu-ibu membawa anak-anaknya ke tempatnya bekerja sehingga hubungan antara ibu dan anak tetap terjalin dengan optimal.

level of education, children have a bigger chance of obtaining better learning experience at home. This may be influenced by the patrilineal tendencies in Indonesian culture.

The number of mothers' working hours positively correlates with their children's non-scholastic competency. The longer a mother works, the higher the competency. Indonesians' sociocultural characteristics make it possible for members of the community to help children develop their potentials. While working out of home, the mothers can leave their children under the care of a close relative or neighbor so that the children can still get the care they need. This gives the children ample opportunities to meet people, enhancing their nonscholastic competency. On the other hand, in a number of regions, working mothers also take their children along to their workplace, thus maintaining the bond between mothers and children.

Tabel 3. Perbedaan Rata-rata Berdasarkan Lamanya Mengikuti Program ECD/
Table 3. Mean Differences Based on Length of ECD Experience

Subtes/Subtest		Perbedaan Rata-rata/Mean Differences						
		<6bl/<6 mo.	6bl-1th/ 6-12 mo.	1-1,5th/ 1-1.5 yr.	1,5-2th/ 1.5-2 yr.	2-2,5th/ 2-2.5 yr.	2,5-3th/ 2.5-3 yr.	>3th/ >3 yr.
Jumlah Partisipan (N)/Number of participants (N)		12	39	18	55	20	33	33
Total Kesiapan/ Total readiness	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/Mean differences (from the non-ECD group)	0,751	3,033	3,751	5,928*	5,540*	4,688*	4,894*
	Sig./Significance	0,763	0,063	0,078	0,000*	0,007*	0,007*	0,005*
Nonskolastik/ Non-scholastic	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/Mean differences (from the non-ECD group)	-0,121	1,430*	0,934	1,556*	1,367*	1,618*	0,521
	Sig./Significance	0,885	0,009*	0,190	0,002*	0,047*	0,005*	0,365
Total Skolastik/ Total scholastic	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/Mean differences (from the non-ECD group)	0,873	1,604	2,817	4,373*	4,173*	3,100*	4,373*
	Sig./Significance	0,668	0,228	0,105	0,000*	0,013*	0,027*	0,002*
Pramembaca/ Pre-reading	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/Mean differences (from the non-ECD group)	-0,525	0,423	0,808	1,020*	1,075*	1,050*	0,656
	Sig./Significance	-0,287	0,189	0,055	0,001*	0,008*	0,002*	0,053
Pramenulis/ Pre-writing	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/Mean differences (from the non-ECD group)	0,178	0,857	0,789	1,787*	0,978	1,193	1,557*
	Sig./Significance	0,843	0,145	0,303	0,001*	0,184	0,054	0,012*
Pra-Matematika/ Pro-math	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,465	-0,067	0,381	0,463*	0,431	0,275	0,336
	Sig./Significance	0,171	0,760	0,186	0,021*	0,120	0,237	0,149
Berbahasa/ Language	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,056	0,210	0,612*	0,427*	0,390	-0,095	0,450*
	Sig./Significance	0,856	0,301	0,022	0,022*	0,127	0,657	0,036*
Memecahkan Masalah/ Problem solving	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,699	0,180	0,227	0,840	1,299	0,676	1,373*
	Sig./Significance	0,447	0,764	0,772	0,124	0,085	0,284	0,030*
Motorik Kasar/ Gross motor	Perbedaan rata-rata (dengan non-ECD)/ Mean differences (from the non-ECD group)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sig./Significance	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

* signifikan pada 5%./significant at 5%.

Banyaknya jumlah anak dalam keluarga bisa menjadi penyebab tidak diikutsertakannya anak dalam program PAUD atau TK. Ibu sangat sibuk mengurus anak paling kecil sehingga tidak sempat mengantarkan anaknya yang lain mengikuti program PAUD

The large number of children in a family may be one reason why the children are not enrolled in an ECE institution or kindergarten. The mother gets very busy taking care of her youngest child and does not have enough time to take her older children to preschool. It is, therefore, important that the community be encouraged to join

atau TK. Dengan demikian penting mendorong masyarakat merencanakan jumlah anak sehingga stimulasi yang diberikan orang tua kepada anak menjadi optimal.

Pendapatan orang tua tidak berhubungan dengan tingkat kesiapan anak untuk bersekolah. Jika orang tua tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan stimulasi optimal, lingkungan dapat melakukan intervensi sejak dini. Dengan adanya intervensi sejak dini dari lingkungan di luar keluarga, kesiapan anak untuk bersekolah meningkat.

e) Peranan Sekolah

Kurangnya integrasi antara program pendidikan anak dan pelatihan bagi orang tua menyebabkan minimnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak. Antusiasme dan keinginan kuat guru untuk melakukan pembelajaran dengan baik menjadi faktor penentu kesiapan belajar anak di SD. Di beberapa PAUD dan SD, terlihat kader berusaha memikirkan berbagai alternatif pembelajaran di tengah minimnya sarana dan berupaya membentuk paguyuban guna memikirkan cara mentransfer pengetahuan kepada anak.

Bahasa pengantar yang digunakan guru di sekolah memengaruhi kemampuan anak berbahasa Indonesia. Dari hasil pengamatan, sebagian besar kader PAUD maupun guru kelas satu SD hanya sedikit menggunakan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Bahasa daerahlah yang lebih banyak digunakan. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman anak terhadap Bahasa Indonesia dan memengaruhi kesiapan bersekolahnya.

f) Peranan Komunitas

Di beberapa daerah, orang tua siswa PAUD pasrah jika kelak tidak mampu menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, peran kader dan guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar, namun juga dalam memberikan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Perlu juga arahan dan bimbingan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

the family planning program, so they can give optimal educational stimulation to their children.

Parents' income does not correlate with their children's level of school readiness. If parents are restrained from giving optimal stimulation for not having adequate financial capacity, the community can step in. Early intervention from outside the family circle can increase children's school readiness.

e) Role of the School

The lack of correlation between child education programs and training for parents hinders parent's participation in their children's learning. Teachers' enthusiasm for providing quality education and their will become the determining factors that affect children's school readiness. In some preschools and elementary schools, there are cadres and teachers who try to find out learning alternatives despite the minimum facilities and establish forums to discuss ways to transfer knowledge to students.

The language of instruction used in the classroom influences students' Indonesian competency. Observed preschool cadres and grade one teachers seldom use Indonesian as the medium of instruction; more often they speak in the local language instead. This leads to students' having low competency in Indonesian and, thus, affects their school readiness.

f) Role of the Community

Parents of preschoolers in some regions have expressed their doubt about whether they will be able to send their children to higher education. Besides having the role of learning facilitators, cadres and teachers are also encouraged to remind the community about the importance of education. Intervention from respected religious and community leaders is also needed in this regard.

ECE memberikan pengalaman belajar tidak terstruktur pada anak usia dini sehingga mereka dapat mempelajari berbagai kemampuan skolastik dan sosial.

ECE provides unstructured learning experiences for young children in order that they can acquire various scholastic and social competencies.



<http://kim-bimasakti.blogspot.com/2012/05/program-pendidikan-anak-usia-dini-paud.html>

Tabel 4. Perbedaan Rata-Rata antara Anak yang Lancar (N=128) dengan Anak yang Tidak Paham (N=15) dan yang Paham (N=126) Bahasa Indonesia/
 Table 4. Mean Differences between Students Who Are Fluent in Indonesian (n=128) and Those Who Do Not Understand (n=15) and Understand (n=126) Indonesian

Subtes/Subtest		Perbedaan Rata-rata/Mean Differences	
		Tidak Paham/ Do Not Understand	Paham/Understand
Jumlah Partisipan (N)/Number of participants (N)		15	126
Total Kesiapan/ Total readiness	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	8,742	3,094
	Sig./Significance	0,000 *	0,002 *
Nonskolastik/ Non-scholastic	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	2,475	0,290
	Sig./Significance	0,001 *	0,383
Total Skolastik/ Total scholastic	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	6,267	2,796
	Sig./Significance	0,000 *	0,001 *
Pramembaca/ Pre-reading	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	1,352	0,344
	Sig./Significance	0,002 *	0,084
Pramenulis/ Pre-writing	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	1,275	1,113
	Sig./Significance	0,100	0,002 *
Pra-Matematika/ Pra-math	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	0,668	0,443
	Sig./Significance	0,021 *	0,001 *
Berbahasa/ Language	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	1,545	0,317
	Sig./Significance	0,000 *	0,008 *
Memecahkan Masalah/ Problem solving	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	1,498	0,650
	Sig./Significance	0,058	0,074
Motorik Kasar/ Gross motor	Perbedaan Rata-rata (dgn lancar) / Mean differences (from the non-ECD group)	0,000	0,008
	Sig./Significance	1,000	0,301

* signifikan pada 5% / significant at 5%.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah biaya untuk insentif atau stimulan agar orang-orang yang berkompentensi tertarik mengabdikan waktu dan kompetensinya untuk program ECE. Saat ini tidak semua kader memperoleh tunjangan atau insentif, dan jika menerima, jumlahnya pun tidak sama.

g) Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota

Di beberapa daerah, adanya peraturan daerah khusus mengenai PAUD (peraturan gubernur/peraturan bupati) menunjukkan hasil kesiapan bersekolah yang tergolong baik, contohnya di Sukabumi, Aceh, dan Probolinggo. Di Kabupaten Sukabumi hasilnya bahkan lebih optimal karena disertai dana APBD yang memadai.

One of the challenges is the provision of incentives that can drum up the interest of competent people in supporting ECE programs with their time and skills. At present, not every cadre gets allowances or incentives; if they do, the amount varies.

g) Role of Kabupaten/Kota Governments

In some regions such as Sukabumi, Aceh, and Probolinggo, regional or local regulations on early childhood education help to ensure a better level of school readiness. Especially in Kabupaten Sukabumi, the result is optimal owing to the adequate support from the local budget.

Rekomendasi

1. Pencanaan berkelanjutan program pemeriksaan kesehatan anak, termasuk imunisasi dan peningkatan status gizi, perlu dipertahankan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat bawah.
2. Penyelenggaraan program intervensi dini dengan muatan taman posyandu (ECE) perlu dilaksanakan minimal 1,5 tahun karena durasi yang lebih pendek tidak memberikan kontribusi signifikan.
3. Perlu partisipasi orang tua di sekolah. Program Bina Keluarga Balita dapat menjadi salah satu cara melibatkan orang tua. Terkait dengan hal ini, alokasi keuangan daerah untuk kegiatan-kegiatan tersebut perlu diperbesar agar dapat mengurangi besarnya iuran yang dikenakan kepada orang tua.
4. Jumlah kader harus diperbanyak dan ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya melalui program bersertifikasi dari lembaga kompeten. Jika intervensi ini merupakan program nasional, maka insentif untuk kader perlu diadakan.
5. Bahasa Indonesia perlu dikenalkan sejak anak memasuki pendidikan usia dini dan dipergunakan secara intensif di kelas.
6. Perlu adanya peraturan daerah khusus mengenai PAUD untuk mendorong hasil kesiapan bersekolah yang baik. Peraturan ini juga perlu didukung oleh dana APBD yang memadai agar hasilnya lebih optimal
7. Alat ukur untuk melihat perkembangan kompetensi siswa perlu diperbaiki, agar kemampuan anak dapat diukur secara menyeluruh dan tepat. ■

DAFTAR ACUAN

Centre for Community Child Health (2008) *Rethinking School Readiness* [Memikirkan Kembali Kesiapan Bersekolah]. Centre for Community Child Health of The Royal Children's Hospital [dalam jaringan] <http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/PB10_SchoolReadiness.pdf> [1 April 2010].

Coley, Richard J. (2002) *An Uneven Start: Indicators of Inequality in School Readiness* [Awal yang Tidak Setara: Indikator Ketidaksetaraan dalam Kesiapan Bersekolah]. New Jersey: Education Testing Service (ETS).

Jensen, E. (2009) *Teaching with Poverty in Mind* [Mengajar dengan Memerhatikan Masalah Kemiskinan]. Virginia: ASCD.

National Scientific Council on the Developing Child (NSCDC) (2007) *The Science of Early Childhood Development: Closing the Gap between What We Know and What We Do* [Ilmu tentang Perkembangan Anak Usia Dini: Menutup Kesenjangan antara Apa yang Kita Ketahui dan Apa yang Kita Lakukan]. NSCDC, Harvard University [dalam jaringan] <<http://www.developingchild.net>> [5 April 2010].

Recommendations

1. Sustainable health programs, including vaccination and nutrition improvement programs, should be maintained and even expanded to reach all the poor community.
2. Early intervention programs through taman posyandu (ECE) should be implemented for at least 1.5 years because a shorter duration would not have any significant contribution.
3. Parents' participation in school is required. The Bina Keluarga Balita (literally translated into Developing the Capacity of Families with Under-Five Children) program can be a way of engaging parents. In regard to the currently high amount of fees incurred by the parents, bigger local budget allocation is needed in order to reduce the fees.
4. More cadres should be recruited. Their knowledge and skills must also be upgraded through a certification program run by competent institutions. If it is a national program, incentives must be provided for the cadres.
5. The use of Indonesian must be encouraged since children enter early education. It has to be used intensively as the medium of communication in classroom activities.
6. There have to be regional or local regulations specific on early childhood education so that a good level of school readiness can be ensured. The regulations must be backed up by sufficient local budget so that an optimum result can be achieved.
7. The tools for measuring the development of students' competencies must be perfected to guarantee a comprehensive and precise measurement. ■

LIST OF REFERENCES

Centre for Community Child Health (2008) *Rethinking School Readiness* [online] <http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/PB10_SchoolReadiness.pdf> [1 April 2010].

Coley, Richard J. (2002) *An Uneven Start: Indicators of Inequality in School Readiness*. New Jersey: ETS.

Jensen, Eric (2009) *Teaching with Poverty in Mind*. Virginia: ASCD.

NSCDC (2007) *The Science of Early Childhood Development: Closing the Gap between What We Know and What We Do* [online] <<http://www.developingchild.net>> [5 April 2010].



EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH: ANALISIS DATA SURVEI ASPEK KEHIDUPAN RUMAH TANGGA INDONESIA (SAKERTI) 2000 DAN 2007

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM IMPLEMENTATION: DATA ANALYSIS OF THE INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY, YEARS 2000 AND 2007

Felix Wisnu Handoyo*



Hosnati/SMERU

Latar Belakang

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun) yang terdiri atas jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Realisasi kedua amanat tersebut terancam ketika pada 2005 pemerintah mengurangi subsidi BBM secara drastis seiring terus melambungnya harga minyak dunia. Kondisi ini berdampak

* Felix Wisnu Handoyo adalah alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

Background

Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that education be the right of all citizens. In addition, Law No. 20/2003 on the National Education System also mandates that every citizen aged 7–15 years be obligated to enroll in the elementary and junior high schools as part of the Nine-Year Compulsory Basic Education program. The realization of these mandates were at risk when in 2005, the government drastically cut the subsidy for oil fuel due to the soaring price of the world oil. This affected the education sector; many students discontinued their study, as their parents

* Felix Wisnu Handoyo is an alumnus of the Faculty of Economics and Business of Universitas Gadjah Mada.

pula pada sektor pendidikan. Banyak siswa putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu lagi membayar biaya sekolah. Data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyebutkan bahwa pada periode tahun ajaran 2004/05–2005/06 secara nasional terdapat 148.980 siswa putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP, atau sebesar 1,97%. Untuk jenjang pendidikan SD, pada periode yang sama tercatat 824.684 siswa putus sekolah, atau sebesar 3,17%. Untuk menekan angka putus sekolah, pemerintah meluncurkan Program BOS pada Juli 2005 untuk tingkat SD dan SMP.

Pada awal pelaksanaan Program BOS, pemerintah menganggarkan dana sebesar 10,3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun berikutnya, alokasi dana BOS mengalami kenaikan menjadi 11,2 triliun rupiah. Pada 2010, dana BOS telah mencapai 16 triliun rupiah. Dengan dana sebesar itu, Program BOS telah mencakup 7,5% dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai 224 triliun rupiah (20% dari APBN).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dana BOS SD meningkat dari Rp235.000 per siswa pada 2005 menjadi Rp397.000 per siswa untuk wilayah kabupaten dan Rp400.000 per siswa untuk wilayah kota pada 2009, masing-masing dengan persentase kenaikan sebesar 68% dan 70%. Hal yang sama juga terjadi di tingkat SMP. Jika dibandingkan dengan anggaran BOS pada 2005, persentase kenaikan dana BOS SMP pada 2009 mencapai 75% untuk wilayah kabupaten dan 77% untuk kota. Alokasi dana BOS tersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mendukung peningkatan wajib belajar sembilan tahun, meski dana BOS saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan.

Artikel ini ditulis berdasarkan sebuah studi yang bertujuan mengevaluasi dampak Program BOS dengan melihat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD dan SMP serta nilai UN. Angka partisipasi siswa kelas enam SD dan kelas tiga SMP yang mengikuti ujian nasional (UN) digunakan sebagai *proxy*.

could not afford the cost for education. Data from the Ministry of National Education states that during the school years of 2004/05 and 2005/06, there were 148,980 junior high school students nationally, or 1.97%, who discontinued their study, while 824,684 elementary school students, or 3.17%, discontinued their study. To reduce the attrition rate, in July 2005, the government launched the School Operational Assistance (BOS) program for the elementary and junior high school levels.

For the initial stage of the BOS program implementation, the government budgeted Rp10.3 trillion. The amount increased to Rp11.2 trillion the following year. In 2010, the BOS funds reached the amount of Rp16 trillion. With such amount, the BOS funds accounted for 7.5% of the total budget for the national education, which was Rp224 trillion in amount (20% of the national budget).

Table 1 shows that the BOS funds for the elementary school level increased from Rp235,000 in 2005 to Rp397,000 for kabupaten and Rp400,000 for kota in 2009, increased by 68% and 70% respectively. This was also the case for the junior high school level. Compared to the situation of 2005, increases in the BOS funds allocation in 2009 were 75% for kabupaten and 77% for kota. This indicates that the government is serious in supporting implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education program, in spite of the fact that the BOS funds have not yet sufficiently covered the entire operational expenses of the school.

This article is written based on a study that is aimed at evaluating the impact of the BOS program by looking at increases in the gross participation rates for the elementary and junior high school levels as well as the students' scores in the UN. It uses the participation rates of sixth grade students of elementary school and third grade students of junior high school in the National Examination (UN) as the proxy.

Tabel 1. Alokasi Anggaran BOS per Siswa per Tahun/*Table 1. The BOS Funds Allocation for Each Student per Year*

Tingkat Sekolah/ School Level	Tahun/Year				
	2005	2006	2007	2008	2009 ^a
SD/Elementary School	Rp235.000	Rp235.000	Rp254.000	Rp254.000	Kabupaten: Rp397.000
					Kota: Rp400.000
SMP/Junior High School	Rp324.000	Rp324.000	Rp354.000	Rp354.000	Kabupaten: Rp570.000
					Kota: Rp575.000

Sumber/Source: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009.

^a Sejak 2009, pemerintah mendistribusikan dana BOS berdasarkan kategori wilayah kabupaten dan kota/The distribution of the BOS funds has been differentiated between kabupaten (district) and kota (city) since 2009.

Data dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data tingkat satuan pendidikan pada data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) gelombang ketiga (2000) dan keempat (2007). Karena Program BOS mulai dilaksanakan pada 2005, data dari kedua gelombang tersebut sesuai untuk melihat dampak pelaksanaan Program BOS. Data dari gelombang ketiga digunakan untuk menggambarkan kondisi sebelum Program BOS diluncurkan, sementara data dari gelombang keempat menggambarkan kondisi ketika Program BOS dilaksanakan. Pada gelombang keempat, 683 sekolah (508 SD dan 175 SMP), atau 96,06% dari total sekolah yang menjadi responden pada Sakerti gelombang keempat (711 SD dan SMP), menerima dana BOS.

Penelitian ini menggunakan metode *difference-in-differences* (DID) yang dinilai mampu menganalisis dampak Program BOS. Metode ini mengobservasi dua kelompok pada dua periode waktu yang berbeda. Kelompok pertama merupakan kelompok kontrol, sementara kelompok kedua merupakan kelompok perlakuan. Selisih antara kedua kelompok tersebut mencerminkan dampak pelaksanaan Program BOS. Penggunaan alat estimasi DID (DID estimator), yaitu *ordinary least square* (OLS), dilandasi asumsi bahwa kedua kelompok observasi memiliki tren yang sama dalam hal kondisi sosial-ekonomi dan karakteristik wilayah.

Evaluasi Dampak BOS

Dampak BOS terhadap Sekolah Dasar

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program BOS mampu meningkatkan angka partisipasi siswa sekolah dasar yang mengikuti UN. Peneliti membagi angka partisipasi siswa sesuai dengan jenis mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Pemisahan ini dilakukan karena variabel kontrol untuk masing-masing angka partisipasi siswa memiliki perbedaan pada variabel independen pendidikan dan gaji yang diterima oleh guru, meski jumlah observasinya sama.

Selain itu, peneliti mencoba melihat dampak besarnya dana BOS yang dialokasikan per siswa (jumlah total dana BOS dibagi jumlah siswa penerima BOS) dan dampak besarnya dana BOS yang diterima secara agregat di tingkat sekolah. Hal ini bertujuan melihat perbedaan dampak penyaluran dana BOS per siswa dan per sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana BOS yang dibagikan per sekolah memiliki dampak positif relatif lebih besar daripada jika dana BOS diberikan per siswa. Pada dasarnya, hal ini sejalan dengan penyaluran dana BOS per sekolah yang telah dilakukan pemerintah sejak 2005.

Research Data and Methodology

This research uses the data at the school level in the third (2000) and fourth (2007) rounds of the Indonesian Family Life Survey (IFLS). As the implementation of BOS began in 2005, the data from the two rounds is suitable to capture the impact of the BOS program implementation. Data from the third round presents the condition before BOS existed, while data from the fourth round presents the condition during the implementation of the program. During the fourth round, 683 schools (508 elementary schools and 175 junior high schools), or 96.06% of all the schools that were respondents of this round (711 elementary and junior high schools), received the BOS funds.

This research uses the difference-in-differences (DID) method, which is considered effective to analyze the impact of the BOS program. The method observes two groups during two different periods of time. The first group is the control group, while the second one is the treatment group. The difference between the two groups' outputs represents the impact of the BOS program implementation. The usage of a DID estimator, namely the ordinary least square (OLS), is based on the assumption that both groups are of the same trend in terms of socioeconomic conditions and geographical characteristics.

Evaluation of the Impact of BOS

BOS Impact on Elementary Schools

Results of the analysis show that the BOS program increases the rate of elementary school students' participation in the UN. The researcher divides the rates of the students' participation according to the subjects, i.e., Bahasa Indonesia and mathematics. The division is made due to the differences in the control variables, namely the independent variables of teachers' education level and income, for each rate, although they have the same number of observations.

In addition, the researcher tries to see the impact of the BOS funds allocated for each student (the total BOS funds divided by the total recipient students) and the impact of the BOS funds received in its entirety by the recipient school. This is meant to see the difference in the impact of the BOS funds distribution between the funds targeted to each student and to each school. Results of the analysis show that the BOS funds distribution per school has a relatively more positive impact than it would if the funds were distributed per student. This is basically in accordance with the the government's implementation of BOS, where its funds have been distributed per school since 2005.

Hasil analisis terhadap nilai UN menunjukkan bahwa keberadaan Program BOS secara statistik tidak memengaruhi nilai UN siswa SD. Program BOS hanya berpengaruh pada tingkat partisipasi siswa SD dalam mengikuti UN. Namun, keberadaan BOS tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas dengan tolak ukur hasil UN Bahasa Indonesia dan Matematika.

Dampak BOS terhadap Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Program BOS pada tingkat SMP berpengaruh positif terhadap peningkatan angka partisipasi siswa dalam mengikuti UN. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dana BOS per sekolah berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi siswa. Di sisi lain, dana BOS jika diberikan per siswa tidak berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi siswa di sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana BOS pada agregasi tingkat sekolah lebih bermanfaat daripada dana BOS yang diterima per siswa.

Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa peningkatan dana BOS per sekolah dan per siswa sebesar satu satuan standar deviasi nilai rata-rata UN akan meningkatkan nilai UN Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran Matematika, Program BOS juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan nilai UN.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Program BOS secara signifikan memengaruhi partisipasi baik siswa SD maupun SMP dalam mengikuti UN. Peneliti menemukan bahwa ada perbedaan dampak dari pembagian dana BOS per unit sekolah dengan yang diterima per individu siswa. Terbukti bahwa pelaksanaan Program BOS yang dikelola secara agregat per sekolah memiliki dampak yang lebih besar bagi peningkatan partisipasi siswa dalam mengikuti UN daripada pengelolaan pada tingkat individu siswa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dana BOS akan lebih efektif penyalurannya jika dikelola pada tingkat sekolah, meskipun jumlah total dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa yang

The results of the analysis of the UN scores show that the the BOS program does not statistically affect the UN scores of the elementary school students. For elementary schools, the BOS program has only impacted students' rate of participation in the UN, however, it has not had any impact on the improvement of their UN scores for Bahasa Indonesia and mathematics.

BOS Impact on Junior High Schools

The BOS program implementation at the junior high school level has a positive impact in increasing students' rate of participation in the UN. For Bahasa Indonesia, the data shows that the distribution of BOS funds per school has increased students' participation. On the other hand, the allocation of BOS funds per student would not have any impact on the increase in students' participation. This indicates that the increase in BOS funds at the school-level aggregation is more useful than it would be if the funds were distributed per student.

Results of the research show that an increase in the BOS funds per school and per student by one standard deviation unit of the average UN score improves the UN scores for Bahasa Indonesia. For mathematics, the BOS program has an even bigger impact in improving the UN scores.

This research suggests that the BOS program has a significant impact on the participation of both elementary and junior high school students in the UN. The researcher found that there are different impacts of the BOS funds, depending on the way it is distributed, that is, per school unit or per individual student. It has been proven that when the BOS program is managed aggregately per school, it will have a bigger impact on students' participation in the UN than if it were managed at the student level. This situation indicates that the BOS funds will be more effectively distributed if they are

Program BOS secara signifikan memengaruhi partisipasi baik siswa SD maupun SMP dalam mengikuti UN.

The BOS program has a significant impact on the participation of both elementary and junior high school students in the UN.



ada di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai penyaluran dana BOS per sekolah (secara agregat) merupakan kebijakan yang efektif apabila dibandingkan dengan penyaluran dana BOS per siswa.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Program BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi baik siswa SD maupun SMP dalam mengikuti UN. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan menarik sebagai berikut.

- a) Hasil estimasi nilai UN menunjukkan bahwa keberadaan Program BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai UN Bahasa Indonesia dan Matematika siswa SD. Sebaliknya, pada tingkat SMP, keberadaan Program BOS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai UN kedua mata pelajaran tersebut. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas pendidikan dengan adanya BOS hanya kentara di tingkat SMP.
- b) Keberadaan Program BOS yang memberi dampak positif terhadap peningkatan angka partisipasi siswa SD dan SMP dalam mengikuti UN mengindikasikan bahwa keberadaan program ini telah sesuai dengan harapan pemerintah yang ketika meluncurkan BOS hanya menginginkan peningkatan angka partisipasi siswa di sekolah.
- c) Nilai atau besarnya dana BOS sangat memengaruhi peningkatan partisipasi siswa di sekolah dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di tingkat SMP. Oleh karena itu, peningkatan dana BOS akan meningkatkan keikutsertaan anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan dasar.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berikut ini adalah saran dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

- a) Bagi pemerintah (Kemendiknas)
 - (1) Besarnya dana BOS yang diberikan per sekolah perlu ditingkatkan karena peningkatan jumlah dana yang dianggarkan untuk BOS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi siswa yang mengikuti UN dan kualitas pendidikan di tingkat SMP.
 - (2) Perlu ada pengawasan dari Kemendiknas terhadap penyaluran dana BOS untuk menghindari kebocoran dana akibat birokrasi yang rumit, mengingat bahwa dana BOS yang diterima per sekolah untuk dialokasikan kepada setiap siswa

managed at the school level, even though their total amount is calculated on the basis of the number of students in each school. Thus, the government's policy on distributing the BOS funds per school (aggregately) is proven to be effective if compared to distributing the funds per student.

Conclusions and Policy Recommendations

Conclusions

This research shows that the BOS program has brought about a positive impact in increasing students' rate of participation in the UN both at the elementary and junior high school levels. Based on the results of the analysis, a number of interesting conclusions were drawn:

- a) *Estimation results of the UN scores show that the BOS program does not have any significant influence on students' UN scores for Bahasa Indonesia dan mathematics at the elementary school level. On the contrary, at the junior high school level, the existence of the program has had a significant influence in improving the UN scores for both subjects. This means that the improvement of the quality of education due to the existence of BOS is only visible at the junior high school level.*
- b) *The BOS program has brought about a positive impact in increasing students' rate of participation in the UN both for the elementary and junior high school levels. This indicates that the program has met the government's expectation which, at the time the program was launched, only aimed to improve students' participation at school.*
- c) *The quantity of BOS funds has an important influence on the increase of students' participation at school and the quality of teaching and learning activities at the junior high school level. Therefore, an increase in the BOS funds will increase the participation of school-age children in basic education.*

Suggestions and Policy Recommendations

The following are suggestions and policy recommendations based on the research results.

- a) *For the government (Ministry of National Education)*
 - (1) *The BOS funds distributed per school need to be increased, as an increase in the amount of funds allocated for BOS has a significant influence in increasing both students' participation in the UN and the quality of education at the junior high school level.*
 - (2) *Considering that the BOS funds received by each school to be allocated to each student has a very important influence in increasing students' participation rate and improving students'*

sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi siswa dan nilai UN siswa.

(3) Evaluasi dampak Program BOS perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hasil evaluasi dampak ini dapat menjadi arahan kebijakan untuk masa mendatang.

b) Bagi masyarakat

Diperlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran dana BOS agar dapat mengurangi penyimpangan anggaran. ■

DAFTAR ACUAN

Kementerian Pendidikan Nasional (2009) *Biar Gratis Asal Berkualitas* [Free but of High Quality] [dalam jaringan] <<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/bos/4.html>> [3 October 2010].

DAFTAR BACAAN

Cameron, Lisa Ann (2000) 'The Impact of the Indonesian Financial Crisis on Children: An Analysis Using the 100-Village Data.' [Dampak Krisis Keuangan Indonesia terhadap Anak: Analisis Menggunakan Data Podes]. Mimeo. University of Melbourne.

Cameron, Lisa Ann (2002) 'Did Social Safety Net Scholarships Reduce Drop-out Rates during the Indonesian Economic Crisis?' [Apakah Beasiswa dari Program Perlindungan Sosial Mengurangi Tingkat Putus Sekolah Selama Krisis Ekonomi di Indonesia?]. Mimeo. University of Melbourne.

Dearden, Lorraine, Carl Emmerson, Christine Frayne, dan Costas Meghir (2009) 'Education Subsidies and School Drop-out Rates' [Subsidi Pendidikan dan Angka Putus Sekolah]. Mimeo. The Institute for Fiscal Studies.

Frekenberg, Elizabeth, James P. Smith, and Duncan Thomas (2003) 'Economic Shocks, Wealth, and Welfare.' [Guncangan Ekonomi, Kekayaan, dan Kesejahteraan]. *Journal of Human Resources* 38: 280–321.

Kementerian Pendidikan Nasional (2009) *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun yang Bermutu*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional-Kementerian Perdagangan (2007) *Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional–Kementerian Perdagangan.

UN scores, it is necessary to have the Ministry of National Education control over the funds distribution in order to prevent leakages resulting from complicated bureaucracy.

(3) *The evaluation of the impact of the BOS program needs to be conducted continuously in order to improve the program's effectiveness and efficiency. Results of the impact evaluation can be used for future policy directions.*

b) *For the civil society*

It is necessary to include the civil society's participation in the monitoring of the distribution of BOS funds in order to reduce budget deviations. ■

LIST OF REFERENCES

Kementerian Pendidikan Nasional (2009) *Biar Gratis Asal Berkualitas* [Free but of High Quality] [online] <<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/bos/4.html>> [3 October 2010].

LIST OF FURTHER READINGS

Cameron, Lisa Ann (2000) 'The Impact of the Indonesian Financial Crisis on Children: An Analysis Using the 100-Village Data.' Mimeo. University of Melbourne.

Cameron, Lisa Ann (2002) 'Did Social Safety Net Scholarships Reduce Drop-out Rates during the Indonesian Economic Crisis?' Mimeo. University of Melbourne.

Dearden, Lorraine, Carl Emmerson, Christine Frayne, and Costas Meghir (2009) 'Education Subsidies and School Drop-out Rates.' Mimeo. The Institute for Fiscal Studies.

Frekenberg, Elizabeth, James P. Smith, and Duncan Thomas (2003) 'Economic Shocks, Wealth, and Welfare.' *Journal of Human Resources* 38: 280–321.

Kementerian Pendidikan Nasional (2009) *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun yang Bermutu* [A Guidebook on the School Operational Assistance in Connection with Quality Nine-Year Compulsory Basic Education]. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional-Kementerian Perdagangan (2007) *Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* [A Handbook of the School Operational Assistance Program Implementation]. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional–Kementerian Perdagangan.

- Newman, John, Menno Pradhan, Laura B. Rawlings, Geert Ridder, Ramiro Coa, dan Jose Luis Evia (2002) 'An Impact Evaluation of Education, Health, and Water Supply Investments by the Bolivian Social Investment Fund' [Evaluasi Dampak Investasi Pendidikan, Kesehatan, dan Pasokan Air oleh Dana Investasi Sosial Bolivia]. *The World Bank Economic Review* 16 (2): 241–274.
- Nicholson, Walter (2004) *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* [Teori Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Dasar dan Perluasan]. 9th ed. Canada: South-Western/Thomsons Learning.
- Rivers, Douglas and Quang H. Vuong (1988) 'Limited Information Estimators and Exogeneity Tests for Simultaneous Probit Models' [Estimator Informasi Terbatas dan Tes Eksogenitas untuk Model Probit Simultan]. *Journal of Econometrics* 39: 347–366.
- Rossen, Harvey S. (2008) *Public Finance* [Keuangan Negara]. 8th ed. New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Skoufias, Emmanuel, Asep Suryahadi, and Sudarno Sumarto (1999) 'The Indonesian Crisis and Its Impact on Household Welfare, Poverty Transitions, and Inequality: Evidence from Matched Households in 100-Village Survey' [Krisis Keuangan Indonesia dan Dampaknya pada Kesejahteraan Rumah Tangga, Transisi Kemiskinan, dan Ketidaksetaraan: Bukti dari Rumah Tangga yang Dcocokkan dalam Survei Podes]. Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Sparrow, Robert (2007) 'Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia' [Melindungi Pendidikan untuk Masyarakat Miskin pada Saat Krisis: Evaluasi terhadap Program Beasiswa di Indonesia]. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 69 (1): 99–122.
- Sugiyanto, Catur (2008) *Ekonomi Mikro: Ringkasan, Teori, Soal, Trik, dan Jawaban*. Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat, Gunawan (2005) *Membangun Indonesia Emas*. Revised ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suryahadi, Asep, Yusuf Suharso, and Sudarno Sumarto (1999) 'Coverage and Targeting in the Indonesian Social Safety Net Programs: Evidence from 100-Village Survey.' Working Paper [Keterjangkauan dan Penargetan dalam Program Perlindungan Sosial: Bukti dari Survei Podes]. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2009) *Introductory Econometrics: A Modern Approach* [Pengantar Econometrik: Pendekatan Modern]. 4th ed. Canada: South-Western, a part of Cengage Learning.
- Newman, John, Menno Pradhan, Laura B. Rawlings, Geert Ridder, Ramiro Coa, and Jose Luis Evia (2002) 'An Impact Evaluation of Education, Health, and Water Supply Investments by the Bolivian Social Investment Fund.' *The World Bank Economic Review* 16 (2): 241–274.
- Nicholson, Walter (2004) *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. 9th ed. Canada: South-Western/Thomsons Learning.
- Rivers, Douglas and Quang H. Vuong (1988) 'Limited Information Estimators and Exogeneity Tests for Simultaneous Probit Models.' *Journal of Econometrics* 39: 347–366.
- Rossen, Harvey S. (2008) *Public Finance*. 8th ed. New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Skoufias, Emmanuel, Asep Suryahadi, and Sudarno Sumarto (1999) 'The Indonesian Crisis and Its Impact on Household Welfare, Poverty Transitions, and Inequality: Evidence from Matched Households in 100-Village Survey.' Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Sparrow, Robert (2007) 'Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia.' *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 69 (1): 99–122.
- Sugiyanto, Catur (2008) *Ekonomi Mikro: Ringkasan, Teori, Soal, Trik, dan Jawaban* [Microeconomics: Summaries, Theories, Questions, Tricks, and Answers]. Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat, Gunawan (2005) *Membangun Indonesia Emas* [Building the Golden Indonesia]. Revised ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suryahadi, Asep, Yusuf Suharso, and Sudarno Sumarto (1999) 'Coverage and Targeting in the Indonesian Social Safety Net Programs: Evidence from 100-Village Survey.' Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2009) *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 4th ed. Canada: South-Western, a part of Cengage Learning.



PAUD DI BANTEN: BEROPERASINYA MODAL BUDAYA DAN KESIAPAN BERSEKOLAH

EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN BANTEN: CULTURAL CAPITAL AND SCHOOL READINESS

Priyono*



<http://paudcampaka.wordpress.com/tag/tombol/>

Pendahuluan

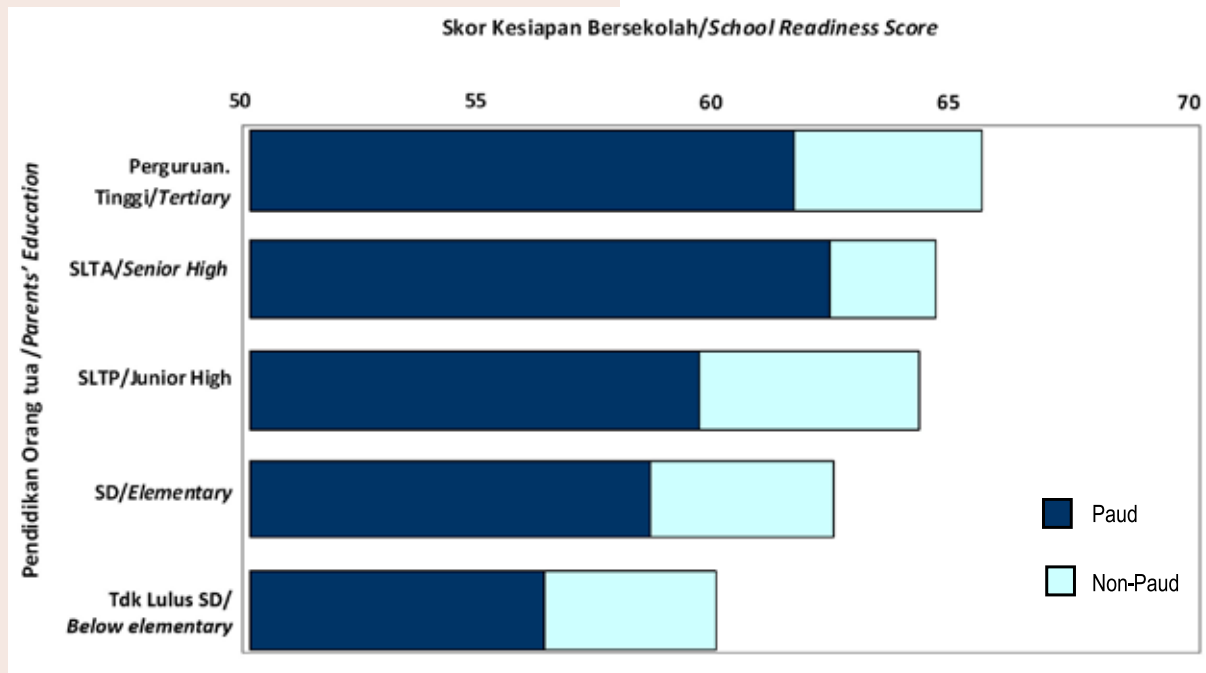
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapan anak bersekolah adalah melalui program pendidikan anak usia dini (PAUD). Hasil studi-studi longitudinal menunjukkan pengaruh positif program PAUD terhadap perkembangan kognitif anak. Sementara itu, hasil studi yang pernah dilakukan di Indonesia memperlihatkan bahwa skor kesiapan bersekolah pada anak yang tidak mengikuti program PAUD dari orang tua yang berpendidikan perguruan tinggi, memiliki skor kesiapan bersekolah yang hampir sama pada anak yang mengikuti program PAUD dengan latar belakang orang tua lulus SD (Gambar 1). Hal ini disebabkan orang tua yang berpendidikan telah sejak awal membekali anak-anaknya dengan cara berbeda untuk menghadapi proses persekolahan.

* Priyono adalah sosiolog dari Universitas Indonesia dan pernah membantu di Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan Nasional.

Introduction

One way to increase a child's readiness to enter elementary school is through the early childhood education (ECE) program. Longitudinal studies have shown the positive impact of the ECE program on children's cognition. Studies in Indonesia, in particular, show that children who did not attend ECE—or known as PAUD—and came from parents with tertiary education have almost the same score of readiness to enter school with children who attended PAUD and came from a family background of elementary-school-educated parents (Figure 1). This is due to the fact that parents with high education have, in a number of different ways, prepared their children to be ready for elementary school since the early stages. As

* Priyono is a sociologist from the University of Indonesia and has worked for the Directorate of the Early Childhood Education of the Ministry of National Education.



Gambar 1. Perbedaan Skor antara Kesiapan Sekolah bagi Anak PAUD dan Non-PAUD berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Orang tua/ Figure 1. School readiness scores of PAUD children and non-PAUD children based on parents' educational background

Sumber/Source: The World Bank Office Jakarta, 2007: 13.

Seperti tampak pada Gambar 1, jika orang tua memiliki sumber daya (dapat diartikan sebagai modal) memadai, tidak tertutup kemungkinan hasilnya akan menyamai atau melebihi anak-anak yang mendapat pelayanan PAUD, demikian pula sebaliknya.

Faktor pendidikan orang tua hanyalah salah satu contoh sumber daya keluarga yang dapat dijadikan modal budaya untuk kesiapan bersekolah, dan masih banyak sumber budaya keluarga lainnya yang dapat digali. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana kepemilikan modal budaya keluarga yang digolongkan berdasarkan kelas sosialnya memengaruhi praktik ketimpangan pendidikan sejak dini.

Kerangka Pemikiran dan Metodologi

Karya-karya Pierre Bourdieu memberikan konteks dalam menelaah dampak dari posisi kelas sosial terhadap kesiapan anak bersekolah. Modelnya memberikan perhatian kepada konflik, perubahan, dan ketimpangan sistematis, serta memperjelas hubungan alamiah yang cair antara struktur dan agensi (kapasitas individual atau kelompok tertentu). Bourdieu berpendapat bahwa anak-anak dari kelas sosial yang berbeda, disosialisasikan kepada cara hidup yang berbeda. Sosialisasi ini memberikan kepekaan anak tentang apa yang dianggapnya nyaman atau alamiah (diistilahkan Bourdieu sebagai *habitus*). *Habitus* ini dapat pula dibedakan menjadi *habitus badaniah* yang berkembang selaras pertambahan usia, dan *habitus sekolastik* yang berkembang karena disposisi (kecenderungan) pembelajaran selama di rumah dan

shown in Figure 1, if parents have adequate resources (capital), it is possible that their children's readiness to enter elementary school will be equal to or even higher than children who previously entered PAUD, and vice versa.

Parents' level of education is only one example of family resources that can be used as cultural capital to prepare children to enter school, and there are still many other cultural resources that can be further explored. This study aims to further explore how family cultural capital ownership, which can be categorized by social class, influences inequality in educational practices from the early stages of childhood.

Theoretical Framework and Methodology

The works of Pierre Bourdieu provide context for the analysis of the impact of social class on children's readiness to enter school. Bourdieu's framework looks at conflicts, changes, and systematic inequality as well as clarifies the natural fluid relationship between structure and agency (the capacity of an individual or group). Bourdieu views that children belonging to different social classes will experience different socialization processes. Socialization processes will develop children's sensitivity about what feels comfortable to them and what they see as being natural—or habitus, in Bourdieu's terms. There are two types of habitus, physical habitus and scholastic habitus. The former develops as a person ages and the latter develops through learning dispositions at home and school which shape a child's readiness to attend school. Furthermore, a child's experience

di sekolah yang mana keduanya membentuk kesiapan sekolah. Kemudian latar belakang pengalaman anak juga membentuk sejumlah sumber daya (modal) individu yang diwariskan dan dipergunakan pada saat berkonfrontasi dengan berbagai pengaturan kelembagaan (arena, medan perjuangan) dalam dunia sosial (Lareau dan Weininger, 2003: 275).

Modal budaya dapat dipahami sebagai segenap unsur budaya yang dapat digunakan sebagai modal yang menurut Bourdieu memiliki tiga bentuk yang berbeda. Pertama, dalam bentuk menyebadan, yakni modal budaya yang merupakan suatu kompetensi atau keahlian yang tidak dapat dipisahkan dari “penyandang” (yaitu orang yang “memiliki”nya). Oleh karena itu, perolehan modal budaya membutuhkan investasi waktu yang memadai untuk belajar dan atau berlatih. Kedua, bentuk modal budaya yang diobjektifkan. Contohnya adalah portofolio karya anak yang membutuhkan latihan melakukan gerakan-gerakan, menggambar, serta menulis terlebih dahulu untuk menguasainya. Ketiga, dalam masyarakat yang berpendidikan formal, modal budaya berada dalam bentuk yang dilembagakan (Bourdieu, 1986 dalam Ball, 2004). Hal ini dapat dijelaskan ketika sekolah mengakui kompetensi dan keahlian individu dengan memberikan ijazah—yang merupakan modal budaya yang menyebadan dalam bentuk nilai objektifnya. Dalam kasus PAUD yang tidak ada keabsahan ijazah, maka bentuk modal budaya ini didasarkan pada bentuk lembaga pelayanan PAUD—yaitu formal dan nonformal—yang mempersiapkan anak untuk bersekolah.

Penelitian tentang modal budaya tidak terlepas dari analisis kelas sosial karena posisi kelas sosial dapat menentukan selera dalam praktik pendidikan. Kelas sosial menurut Bourdieu adalah kompleks karena struktur objektifnya memiliki prinsip homologi (kemiripan) dan terbentuk berdasarkan akumulasi berbagai bentuk modal seperti modal sosial, modal ekonomi, modal simbolik, dan modal budaya itu sendiri.

Karena kompleksnya permasalahan, maka untuk studi ini dipilih metode kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan, survei rumah tangga, dan kelompok diskusi terfokus (FGD) yang diteliti di dua kecamatan dengan stratifikasi sosial yang kecil, dengan tipe daerah perdesaan dan peri-urban di Provinsi Banten (Gambar 2). Data kuantitatif diambil melalui perbandingan nilai rapor anak di 15 lembaga PAUD terpilih yang kemudian ditelusuri kondisi keluarganya melalui survei rumah tangga.

based on her or his background also generates a number of individual resources (capital) which is passed on to the next generation and is used when confronting various institutional norms (arena, field of struggle) in the social world (Lareau and Weininger, 2003: 275).

Cultural capital can be understood as a set of cultural elements that can be used as capital and which Bourdieu views as having three different forms. First, in an embodied form, a cultural capital is a specific competency or skill which cannot be taken away from the “owner”. That is why sufficient time needs to be invested to learn or practice in order to obtain cultural capital. The second form is objectified cultural capital. An example of this form is a child’s portfolio which involves prior learning of physical movements, drawing, and writing in order to master the undertaking. Ultimately, in an educated society, cultural capital takes an institutionalized form, which is the third form (Bourdieu, 1986 cited in Ball, 2004). This is clear in the case when, upon graduation, a school acknowledges a student’s competency and expertise by issuing a diploma. The diploma is the cultural capital which is embodied in its objective value. In the case of a PAUD that awards no diploma, the form of cultural capital is based on the type of PAUD institution, whether it is formal or nonformal, which prepares children for schooling.

The study of cultural capital is one that cannot be separated from social class analysis because a person’s class position may determine her or his preference in education. Social class, in Bourdieu’s view, is complex because its objective structure retains the principle of homology and is based on the accumulation of various forms of capital, such as social capital, economic capital, symbolic capital, and cultural capital itself.

Because of the complexity of the problem, a qualitative method was employed, using a number of data collection techniques such as field study, household survey, and focus group discussion (FGD) in two kecamatan (subdistricts) with little social stratification in a rural and a peri-urban area in the Province of Banten (Figure 2). Quantitative data was obtained through a cross-comparison of students’ report cards in 15 selected PAUD institutions where a student’s family background was then traced through the household survey.

“Pada usia dini, anak layaknya tidak dicabut dari suasana keluarga dan dunia bermain.”
“During the early years of life, a child should not be withdrawn from a familial atmosphere and world of play.”

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kelas Sosial dan Praktik Pendidikan Anak

Kriteria kelas sosial yang awalnya disusun melalui FGD ditentukan berdasarkan jenis mata pencarian dan tingkatan prestisenya, kepemilikan material, pendapatan keluarga, serta tingkat pendidikan orang tua. Menurut hasil FGD, terdapat tiga kelas sosial orang tua di Banten, yaitu faksi kelas dominan *urang beunghar* (orang kaya), faksi kelas menengah *urang tengah* (orang menengah) dan faksi kelas didominasi *urang leutik* (orang kecil).

Penghasilan keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam praktik pendidikan anak yang berbeda menurut kelas sosialnya. Penghasilan *pas-pasan* kelas sosial *urang leutik* mengurangi kesempatan untuk mempersiapkan anaknya bersekolah. Anak-anaknya lebih terpapar dengan kebiasaan mengudap (*snack habit*) yang mengganggu selera makan dan asupan gizi. Dengan kemampuan penghasilannya, teridentifikasi kepemilikan jumlah dan variasi benda-benda yang dapat mendukung proses literasi anak yang secara simbolis dapat menggambarkan praktik-praktik pendidikan anak dalam keluarga.

Tingkat pendidikan orang tua memiliki pengaruh paling besar dalam praktik pendidikan anak di rumah sehingga merupakan komponen paling penting dalam kesiapan bersekolah anak. Dengan pengetahuan dan keterampilan orang tua, anak *urang beunghar* telah dibekali berbagai macam kemampuan, termasuk perilaku sopan dan baik sehingga pada saat di sekolah guru menjadi senang. Praktik pendidikan anak yang paling membedakan antarkelas sosial adalah penggunaan bahasa Indonesia di rumah. Faktor historis dan tuntutan pekerjaan, menjadikan penggunaan bahasa Indonesia dominan dalam keluarga sehingga anak *urang beunghar* mudah memahami percakapan dan instruksi guru di sekolah, sedangkan anak *urang leutik*, ketika di rumah didominasi penggunaan bahasa daerah. Sebagaimana penelitian Bernstein (1977), pola-pola pembicaraan berdasarkan kelas sosial orang tua juga memberikan pengaruh terhadap pencapaian pendidikan anaknya. Di keluarga *urang beunghar*

Findings and Discussion

Social Class and Children's Educational Practices

The criteria of each social class, which were initially developed through the FGDs, were based on the type of household livelihood and level of prestige, articles owned, family income, and parents' education attainment. According to the FGDs, there are three categories of social classes of parents in Banten, i.e., the rich people dominant class faction (*urang beunghar*), the middle people middle-class faction (*urang tengah*), and the poor people dominated class faction (*urang leutik*).

The family income has a big influence on educational practices and is used in various ways in every social class. The *urang leutik* class' "just-about-enough" income reduces their chance of developing their children's readiness to enter school. Children of this social class are more adapted to a snack eating habit which ruins their appetite and reduces their nutritional intake. Based on their income capacity, a number of articles owned that can support children's literacy were identified, which symbolically represents the family's educational practices.

Parents' education has the greatest influence on the educational practices of their children at home which therefore makes it the most important component for the development of school readiness. With their parents' knowledge and skills, children of the *urang beunghar* social class have acquired various capacities, including politeness and good behavior so that once they are at school, the teachers are pleased. One educational practice which differentiates the most between the classes is the use of the Indonesian language at home. Historical factors and working requirements have resulted in the intense use of Indonesian in the household, making it easier for the children of the

urang beunghar social class to understand conversations and teachers' instructions in school, while for the *urang leutik* social class, the use of local dialect at home is predominant. As Bernstein (1977) shows, the pattern of speech based on parents' social class also influences their children's educational attainment. In Banten,



Gambar 2. Peta wilayah penelitian/ Figure 2. Map of the study area

pola-pola pembicaraan antara orang tua dan anaknya interaktif. Sebaliknya, di keluarga *urang leutik*, karena keterbatasan waktu bersama keluarga, pola-pola pembicaraan lebih banyak monolog.

Habitus Anak dan Kesiapan Bersekolah

Kesiapan bersekolah merupakan akumulasi dari habitus anak yang merupakan disposisi yang membentuk sikap dan perilaku, termasuk juga selera. Bagian ini membahas perkembangan usia (habitus badaniah) dan perkembangan skolastik yang dikonstruksikan melalui proses pembelajaran (habitus skolastik). Hal ini merupakan bagian dari kesiapan sekolah yang diberi penilaian oleh guru dan mencerminkan modal budaya yang telah diinvestasikan keluarga (Albright dan Luke, 2008: 17).

1. Habitus Badaniah

Usia sebagai wujud habitus badaniah sesungguhnya merupakan investasi modal budaya, sedangkan sekolah akan menangkap sinyal-sinyal budaya tersebut yang dipersepsikan guru sebagai anak yang "siap sekolah". Penelitian ini menemukan adanya gejala guru memberi penilaian kesiapan sekolah yang lebih rendah kepada murid-murid yang usianya lebih tua dan sebaliknya untuk anak-anak yang lebih muda.

Gambar 3 memperlihatkan linearitas antara usia dan kesiapan sekolah. Walaupun tampaknya bertentangan dengan asumsi teori modal budaya, yakni semakin bertambah usia akan semakin matang kesiapan sekolahnya, gejala tersebut sesungguhnya masih sejalan dengan teori modal budaya. Anak-anak yang lebih muda usianya cenderung berasal dari keluarga *urang beunghar* yang secara sengaja memasukkan anaknya ke sekolah PAUD formal dengan pertimbangan usia tertentu. Sementara itu, anak-anak yang lebih tua cenderung berasal dari keluarga *urang leutik* yang dapat masuk secara "tidak sengaja" ke PAUD nonformal karena gurunya aktif menjaring murid-murid. Gejala ini menunjukkan bahwa kematangan anak untuk sekolah adalah wujud dari

it was found that among the urang beunghar social class families the pattern of speech between parents and children was interactive. In contrast, among the urang leutik social class families the pattern was monologue owing to limited family time.

Children's Habitus and School Readiness

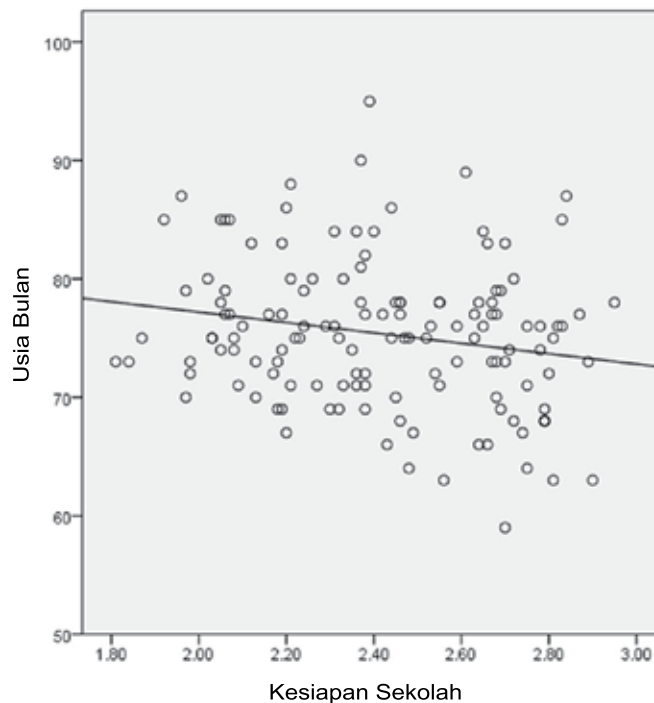
School readiness is an accumulation of children's habitus which is a disposition that shapes the attitude and behavior as well as taste. This section discusses the development of maturity (physical habitus) and scholastic development which are constructed through learning processes (scholastic habitus). These are aspects of school readiness that teachers assess and they reflect the cultural capital invested by the family (Albright and Luke, 2008: 17).

1. Physical Habitus

Age as a manifestation of physical habitus is actually a form of cultural capital investment. While the school will "catch" these cultural signals, teachers will perceive the child as being ready for school. The study finds that there is a tendency for teachers to assess older students as being less ready for school and vice versa with younger students

Figure 3 shows the linearity of age and school readiness. Although appearing in contradiction with the assumption of the theory of cultural capital where the older the child the better prepared she or he is for school, this finding is still in line with the theory. Younger

children tend to come from the urang beunghar social class that intentionally admits their children to formal PAUD in consideration of the child's age. On the other hand, older children tend to come from the urang leutik social class that were admitted "unintentionally" to nonformal PAUD due to teachers actively seeking for new students. This tendency shows that children's school maturity is a manifestation of the family's



**Gambar 3. Linearitas usia anak dan kesiapan bersekolah berdasarkan penilaian guru/
Figure 3. Linearity of age and school readiness based on teachers' assessment**

Sumber/Source: Hasil data survey (N=144)/Survey data (N=144).

Kelas sosial orang tua menentukan kesiapan bersekolah anaknya melalui penanaman modal budaya sejak usia dini.

The social class of the parents determines the school readiness of their children through the socialization of cultural capital since an early age.



<http://muchroji-multiply.com/journal/item/2984>

investasi modal budaya keluarga sehingga anak *urang beunghar* yang memiliki modal lebih banyak dapat lebih dini mempersiapkan diri dan lebih baik kesiapan sekolahnya daripada anak-anak dari kelas *urang leutik*.

Anak-anak yang belum mencapai usia 7 tahun pada saat dimulainya tahun pelajaran baru dikenal dengan sebutan *academic redshirt*, suatu kondisi yang memungkinkan anak yang belum cukup umur untuk diperpanjang masa belajarnya di PAUD sampai tingkat dianggap mampu untuk melanjutkan ke SD (Graue *et al.*, 2002 dan Lareau dan Weininger, 2003). Di Indonesia, hal ini belum dipandang penting, mungkin karena pemerintah lebih berfokus pada wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas), padahal secara signifikan dapat memengaruhi tingkat mengulang dan tingkat putus sekolah secara keseluruhan.

2. Habitus Kesiapan Sekolah

Sisi lain dari kesiapan sekolah adalah habitus skolastik yang merupakan disposisi yang ditanamkan secara sengaja (*culturally arbitrary*) dan diberi penilaian oleh guru berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan kelompok dominan. Pada studi kasus ini, konstruksi kesiapan sekolah oleh kelas dominan dapat dilacak ketika Dr. Pamela C. Phelps menjadi narasumber seminar nasional tentang konsep pembelajaran yang dihadiri Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) serta implementasinya pada sekolah Al-Falah sebagai tempat magang guru-guru PAUD yang difasilitasi pemerintah. Metode pembelajaran yang dikembangkan pemerintah di sekolah tersebut dikenal sebagai "Sistem Sentra" (Direktorat PAUD, 2004). Para guru PAUD di Banten yang telah magang mengadopsi unsur-unsur dari metode pembelajaran tersebut dan menuangkannya dalam buku rapor sebagai unsur-unsur penilaian terhadap kemampuan dasar fisik (sebagai habitus

cultural capital and therefore children of the urang beunghar social class who have more capital can prepare themselves at an earlier age and is more ready for school than children of the urang leutik social class.

*Children who have not reached the age of seven when the new academic year begins are referred to as academic redshirt, a term describing the condition that makes it possible for children under the minimum elementary school age to extend their study at PAUD until they reach the stage when they are considered eligible for elementary school (Graue *et al.*, 2002 and Lareau and Weininger, 2003). In Indonesia, academic redshirt is not considered important. This may be due to the government's main focus on the nine-year compulsory study program, even though academic redshirt may affect the overall rate of grade retention and school attrition.*

2. School Readiness Habitus

Another aspect of school readiness is the scholastic habitus which is a culturally arbitrary disposition and is assessed by teachers based on criteria determined by the dominant group. In this case study, the school readiness constructed by the urang beunghar social class was apparent when Dr. Pamela C. Phelps was a resource person for a national seminar on the concept of learning which was attended by the minister for national education and upon the implementation of the concept in Al-Falah, a school where PAUD teachers were facilitated to serve as interns. The learning method developed by the government in this school was known as "Sistem Sentra" (Direktorat PAUD, 2004). Teachers of the PAUD in Banten who served as interns adopted elements of the learning method and used them in students' report card to assess basic physical (physical habitus), cognitive,

badaniah), pembentukan perilaku, kemampuan dasar kognitif, kemampuan dasar berbahasa, dan kemampuan dasar seni.

Penelaahan sosiologis terhadap praktik pedagogis orang tua di rumah dan guru di sekolah dengan menggunakan penilaian unsur-unsur di atas menunjukkan perbedaan yang nyata antara pengalaman anak-anak yang berasal dari kelas sosial *urang leutik* dan *urang beunghar*. Anak-anak dari kelas sosial *urang beunghar* lebih mudah mengikuti proses persekolahan karena adanya kesamaan bentuk praktik pedagogis di rumah, sedangkan hal sebaliknya dialami kelas sosial *urang leutik*. Pengujian kuantitatif berdasarkan skor angka rapor juga menunjukkan korelasi yang signifikan antara praktik pedagogis dan variabel-variabel kelas sosial, penghasilan keluarga, dan pendidikan orang tua.

Hal ini memperkuat argumentasi tentang modal budaya yang menyebarkan (*embodied cultural capital*), yakni bahwa anak membawa “kode-kode dari rumah,” dan ketika “dibuka” hal ini tampak nyata pada perkembangan perilaku anak dan pada penggunaan bahasa nasional. Walaupun tidak menimbulkan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, kelas sosial di Banten mengindikasikan gaya hidup dan penggunaan bahasa. Latar belakang pendidikan orang tua yang menjadi penyebab utama kesiapan bersekolah memperjelas teori reproduksi budaya yang memandang bahwa pada ranah pendidikanlah modal budaya paling mungkin dikonversi menjadi kekuasaan dan kekayaan.

Kesiapan Bersekolah pada PAUD Formal dan PAUD Nonformal

Modal budaya yang dilembagakan berkaitan dengan kredibilitas lembaga yang memberikan penilaian terhadap kesiapan bersekolah anak. Dalam studi ini, data untuk pemetaan konfigurasi kepemilikan modal lembaga—dengan konfigurasi kepemilikan empat bentuk modal menurut teori Bourdieu (1986), yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik—dikumpulkan dari lembaga yang terpilih. Nilai agregat pemetaan ini menjadi dasar klasifikasi dan pemeringkatan lembaga.

Hasil pemetaan menunjukkan konfigurasi modal pada dua tipologi utama lembaga, yaitu PAUD formal dan PAUD nonformal, serta pada tipe sekolah: PAUD rintisan, PAUD yang sudah mandiri, raudatul athfal dan taman kanak-kanak. Secara berurutan, ada gradasi kepemilikan modal dari yang paling rendah pada PAUD rintisan hingga yang paling tinggi pada TK. Ketika digabungkan dengan data kuantitatif skor kesiapan sekolah, analisis ragam (ANOVA) memperlihatkan adanya nilai perbedaan yang nyata, dengan probabilitas $p < .05$.

language, and artistic abilities, as well as behavior development.

A sociological analysis on pedagogical practices implemented by parents at home and teachers at school using the assessments above reveal the apparent differences between the children of the urang leutik and urang beunghar social class. Children of the urang beunghar social class find it easier to follow the schooling process because of its similarity with pedagogical practices at home, while the opposite is true for children of the urang leutik social class. Quantitative evaluation based on report card marks also shows a significant correlation between pedagogical practices and social class, family income, as well as parents' education variables.

The findings above support the argument of an embodied cultural capital, where children take with them "codes from home" and that when these codes are "broken", they will reveal a child's behavioral development and ability to use the official language. Although not representing any distinction in everyday life, social class in Banten indicates life style and language usage. Parents' educational background as the prima causa of school readiness reaffirms the theory of cultural reproduction which views that it is at the field of education that cultural capital is most possibly converged into power and wealth.

School Readiness in Formal and Nonformal PAUD

Institutionalized cultural capital is related to the credibility of the institution assessing students' readiness to enter school. In this study, the data for mapping institutions' configuration of capital ownership based on Bourdieu's theory of four types of capitals—economic capital, social capital, cultural capital, and symbolic capital—was collected from selected institutions. The aggregate sum of this mapping became the basis for the classification and rating of the institutions.

The results of the mapping shows the capital configuration of the two main types of institution, i.e., the formal and nonformal PAUD, and also of the pioneer PAUD, autonomous PAUD, Islamic kindergartens, and kindergartens. Consecutively, there is a gradation of capital ownership from the lowest found in the pioneer PAUD to the highest found in kindergarten. When combined with the quantitative data for the score of school readiness, using the analysis of variance (ANOVA), a significant difference was found with a probability of $p < .05$.

Nilai ragam terendah adalah pada PAUD nonformal rintisan dan tertinggi pada PAUD formal TK. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik PAUD formal memberikan ruang lebih luas bagi penilaian perkembangan anak, anak bertambah aktif sebagai akibat bertambahnya usia dipandang sebagai hal positif. Di samping itu, semakin besar angka simpangan baku pada lembaga PAUD formal mengindikasikan adanya ruang individualitas murid sebagai pribadi unik yang diperhatikan oleh guru-guru yang lebih terlatih dan berpengalaman. Sebaliknya, pada PAUD nonformal, karena keterbatasan konfigurasi modal lembaga, lembaga ini lebih cenderung mempraktikkan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung (calistung)

Perubahan Ranah PAUD dan Praktik Calistung

Dalam studi kasus ini, pembelajaran calistung awalnya muncul sebagai tuntutan dari orang tua kelas sosial *urang beunghar* yang merasa kurikulum PAUD yang ada tidak dapat mengakomodasi kesiapan anaknya untuk memasuki SD, terutama SD favorit, yang sejak kelas awal sudah menonjolkan pengajaran aspek kognitif.

Namun, praktik calistung merupakan suatu bentuk baru kekerasan simbolik kepada anak (Chamboredon dan Prevot, 1975) karena anak dipaksa mencapai kompetensi yang tidak sesuai dengan tingkatan umur dan kemampuannya. Maraknya praktik calistung di PAUD tidak terlepas dari beroperasinya modal budaya kelas dominan yang mengeksklusikan anak-anak kelas sosial yang didominasi (kelas *urang leutik*) dari akses ke SD favorit yang menerapkan persyaratan tes masuk.

The nonformal pioneer PAUD has the lowest variance score while the formal kindergarten PAUD has the highest score. This shows that formal PAUD teachers provide more room for the assessment of students' development where if children become more active as they grow older is seen as a positive development. In addition, the higher the standard error for formal PAUD institutions indicates that there is more room for individuality in these institutions where students are regarded as unique individuals who deserve the attention of well-trained and experienced teachers. In contrast, due to limited configuration of capital, nonformal PAUD's teaching practices tend to be limited to reading, writing, and arithmetic (calistung).

Changes in the Domain of PAUD and the Practice of Calistung

The calistung practice in the study areas was initially a demand put on the school by parents of the urang beunghar social class because they felt that the existing PAUD curriculum could not provide their children with the knowledge needed to enter elementary school, especially exclusive elementary schools, in which learning processes from the beginning emphasize on cognitive aspects.

However, the calistung practice is a new kind of symbolic violence against children (Chamboredon and Prevot, 1975). In this teaching practice, children are forced to reach a level of competency which is not appropriate to their age and capacity. The popular practice of calistung at PAUD is connected to the operation of cultural capital belonging to the urang beunghar social class which aims to exclude children from the urang leutik social class from having access to exclusive elementary schools by requiring children to pass a number of tests prior to acceptance.

Tingkat pendidikan orang tua merupakan komponen yang paling penting dalam kesiapan bersekolah anak.

Parents' education is the most important component for the development of school readiness.



<http://oncl100education.wordpress.com/2007/07/21/paud-di-tanah-tradisi-banten/>

Ironisnya, praktik calistung lebih banyak terjadi pada PAUD nonformal yang muridnya berasal dari kelas sosial *urang leutik* yang tidak akan bersaing masuk SD. Merasuknya modal budaya kelas dominan telah mendorong orang tua dari kelas sosial *urang leutik* untuk menuntut praktik calistung, sementara kurangnya pengetahuan para guru turut mendukung keberlanjutan praktik ini.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kelas sosial orang tua menentukan kesiapan bersekolah anaknya melalui penanaman modal budaya sejak usia dini. Sebagai titik awal, teori modal budaya memberikan pemahaman tentang proses transisi sekolah dan praktik PAUD yang mengarah pada calistung sebagai moda eksklusif dan dominasi terhadap kesiapan bersekolah.

Pengurangan tuntutan terhadap praktik calistung dapat dilakukan melalui penguatan pemahaman orang tua dan guru tentang pembelajaran PAUD yang mengajak anak bermain sambil belajar. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pada usia dini, anak layaknya tidak dicabut dari suasana keluarga dan dunia bermain. Secara historis, PAUD percontohan Taman Indria (1922) yang dipelopori Ki Hajar Dewantara—menteri pendidikan Indonesia yang pertama—sudah mempraktikkan proses pembelajaran tersebut dengan prinsip *asih* (mengasahi), *asah* (memahirkan), dan *asuh* (membimbing). Praktik pedagogi ini hendaknya dilanjutkan pada pendidikan SD yang menerapkan kurikulum tematik sesuai dengan standar pendidikan nasional. Untuk itu, peran penilik PAUD dan Pengawas SD di bawah kewenangan pemerintah daerah menjadi penting. ■

DAFTAR ACUAN

- Albright, James dan Allen Luke (eds.) (2008) *Pierre Bourdieu and Literacy Education* [Pierre Bourdieu dan Pendidikan Melek Huruf]. New York: Routledge.
- Ball, Stephen J. (ed.) (2004). *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education (Bunga Rampai Routledge Falmer tentang Sosiologi Pendidikan)*. London: RoutledgeFalmer: 15-29.
- Bernstein, Basil (1977) 'Class and Pedagogies: Visible and Invisible' [Kelas dan Pedagogi: Yang Tampak dan Tidak Tampak]. Dalam Jerome Karabel dan A. H. Halsey (eds.) *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press: 511–534.

Ironically, calistung is much more practiced in nonformal PAUD whose students are from the urang leutik social class and who would not be competing to get into elementary school. The embedded cultural capital of the urang beunghar social class has led parents of the urang leutik social class to demand for the calistung practice while teachers' lack of knowledge has kept the practice in place.

Conclusion and Recommendation

This study shows that the social class of the parents determines the school readiness of their children through the socialization of cultural capital since an early age. As a point of departure, the theory of cultural capital provides us with the understanding of the school transition process and PAUD practices which tend to implement calistung learning as a mode of exclusion and domination of school readiness.

In order to reduce calistung practices, there is a need to strengthen parents' and teachers' understanding of the early childhood education learning process which allows children to play while learning. This is in line with the view that during the early years of life, a child should not be withdrawn from a familial atmosphere and world of play. Historically, Taman Indria, a pilot PAUD initiated in 1922 by Ki Hajar Dewantara—Indonesia's first minister for education—had practiced the learning process based on the principles of loving, teaching, and caring for. This pedagogical practice should continue in elementary school which executes a thematic curriculum in accordance with the national standard. For this purpose, the role of the PAUD and elementary school supervisors is essential. ■

LIST OF REFERENCES

- Albright, James and Allen Luke (eds.) (2008) *Pierre Bourdieu and Literacy Education*. New York: Routledge.
- Bernstein, Basil (1977) 'Class and Pedagogies: Visible and Invisible.' In Jerome Karabel and A. H. Halsey (ed.) *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press: 511–534.
- Ball, Stephen J. (ed.) (2004). *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*. London: RoutledgeFalmer: 15-29.

Chamboredon, Jean-Claude dan Jacques Prevot (1975) 'Changes in the Social Definition of Early Childhood and the New Forms of Symbolic Violence' [Perubahan pada Definisi Sosial Usia Dini dan Bentuk-Bentuk Baru Kekerasan Simbolik]. *Theory and Society* 2 (3): 331–350.

Direktorat PAUD (2004) Bahan Pelatihan Lebih Jauh dengan Sentra dan Saat Lingkaran. Jilid 1-5. Jakarta: Depdiknas.

Graue, Elizabeth, Janice Kroeger, dan Christopher Brown (2002) Living the Gift of Time' [Biar Waktu yang Menentukan]. *Contemporary Research in Early Childhood Education* 3 (3): 338–353.

Lareau, Annette dan Elliot B. Weininger (2003) 'Cultural Capital in Educational Research: A Critical Assessment' [Modal Budaya dalam Penelitian tentang Pendidikan: Sebuah Penilaian Kritis]. *Theory and Society* 32 (5/6) Special Issue on The Sociology of Symbolic Power: A Special Issue in Memory of Pierre Bourdieu: 567–606.

The World Bank Office Jakarta (2007) Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Investment to a Better Life [Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia: Investasi untuk Hidup yang Lebih Baik]. Jakarta: The World Bank.

Chamboredon, Jean-Claude and Jacques Prevot (1975) 'Changes in the Social Definition of Early Childhood and the *New Forms of Symbolic Violence.*' *Theory and Society* 2 (3): 331–350.

Direktorat PAUD (2004) Bahan Pelatihan Lebih Jauh dengan Sentra dan Saat Lingkaran [Training Material, More on Sentra and Saat Lingkaran]. Vol. 1-5. Jakarta: Depdiknas.

Graue, Elizabeth, Janice Kroeger, and Christopher Brown (2002) Living the Gift of Time' *Contemporary Research in Early Childhood Education* 3 (3): 338–353.

Lareau, Annette and Elliot B. Weininger (2003) 'Cultural Capital in Educational Research: A Critical Assessment.' *Theory and Society* 32 (5/6) Special Issue on The Sociology of Symbolic Power: A Special Issue in Memory of Pierre Bourdieu: 567–606.

The World Bank Office Jakarta (2007) Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Investment to a Better Life. Jakarta: The World Bank.

publikasi Terbaru/recent publications

Catatan Kebijakan/Policy Brief

MENGINTEGRASIKAN ASPEK SPASIAL KEMISKINAN KE DALAM PERENCANAAN SPASIAL PERKOTAAN: SOLUSI UNTUK MENGATASI KEMISKINAN PERKOTAAN

(Prio Sambodho, Rizki Fillaili & R. Justin Sodo; Editor(s): Gunardi Handoko & Budhi Adrianto)

Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia//Available in Indonesian only

Akan diterbitkan dalam bahasa Inggris/English version forthcoming

Laporan Penelitian/Research Reports

BASELINE STUDY FOR THE SOCIOECONOMIC IMPACT OF TAMADERA INSURANCE PROGRAM IN JAKARTA

(Bambang Soelaksono, Asri Yusrina, Rika Kumala Dewi, Armand Arief Sim, & Rahmitha; Editor: Stephen Girschik)

Hanya tersedia dalam bahasa Inggris/Available in English only

Akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia/Indonesian version forthcoming

Buku/Book

SURVEI BASELINE KEHADIRAN GURU DAN BANTUAN KESEJAHTERAAN UNTUK GURU DI DAERAH TERPENCIL

(Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Meuthia Rosfadhila, Silvia Defina, Sirojuddin Arif, Stella Aleida Hutagalung, Eduwin Pakpahan & Asri Yusrina; Editor: Liza Hadiz & Valentina Y.D. Utari)

Hanya tersedia dalam bahasa Indonesia/Available in Indonesian only

Laporan penelitian terkait tersedia dalam bahasa Inggris dengan judul: /English research report available under the title: *Teacher Absenteeism and Remote Area Allowance Baseline Survey*

PENTINGNYA KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN GIZI SEIMBANG PADA PAUD *THE IMPORTANCE OF POLICIES THAT INTEGRATE EDUCATION ON BALANCED NUTRITION INTO EARLY CHILDHOOD EDUCATION*

Lilik Kustiyah, Cesilia Meti Dwiriani, Evy Damayanthi, and Neti Hernawati*



UNICEF

Memperkenalkan gaya hidup sehat kepada anak-anak sejak usia dini merupakan sebuah investasi untuk membangun masyarakat sehat di masa mendatang. Pada masa usia dini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga membutuhkan asupan zat gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan stimulasi pendidikan yang memadai agar tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Saat ini kita sedang menghadapi transisi masalah gizi dengan adanya pergeseran pola penyakit di masyarakat dari dominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi balita pendek (*stunting*) mencapai 35,7% sementara penyakit infeksi juga masih banyak (Depkes, 2010). Namun, sejalan

Introducing children to healthy lifestyles since their early age is an investment to create a healthy society for the future. During their early age, children are growing and developing rapidly. Therefore, they need sufficient nutritional intake, health service, care, and educational stimulation in order to achieve optimum growth and development. With a change in disease pattern from the situation where communicable diseases were previously dominant to recently where noncommunicable diseases are prevailing, we are currently faced with a transition in nutrition-related issues. Data from the 2010 Basic Health Research (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas) show that the stunting prevalence among children under five years of age has reached the rate of 35.7% and diseases caused by infections are still frequently found (Depkes, 2010). However, along with the

* Lilik Kustiyah, Cesilia Meti Dwiriani, dan Evy Damayanthi adalah dosen pada Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB; Neti Hernawati adalah dosen pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, FEMA, IPB.

* Lilik Kustiyah, Cesilia Meti Dwiriani, and Evy Damayanthi are lecturers at the Community Nutrition Department, while Neti Hernawati is a lecturer at the Family and Consumer Sciences Department, all of them at the Human Ecology Faculty, Bogor Agricultural University.

dengan pembangunan, penderita kelebihan gizi di Indonesia juga meningkat. Meskipun secara nasional belum ada data status gizi balita yang mengalami gizi lebih, hasil penelitian Dwiriani *et al.* (2010) pada 1.030 anak SD di Kota Bogor telah memperlihatkan kecenderungan terjadinya masalah gizi ganda. Sebesar 22,3% anak mengalami kelebihan berat badan (*overweight*) dan gemuk (*obese*); 7,3% anak kurus (*wasted*); dan 12,8% anak dengan pertumbuhan terhambat (*stunted*). Kondisi demikian diduga sebagai dampak dari asupan zat gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan stimulasi pendidikan yang kurang optimal pada saat usia dini.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan gizi adalah melalui pendekatan pendidikan gizi yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan pendidikan gizi secara luas ke masyarakat. Pendidikan gizi memiliki efek yang sangat luas, berkesinambungan, dan juga mudah dilakukan, meskipun memerlukan waktu relatif lama. Pada 1995, pemerintah telah meluncurkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS (Depkes, 2005). Panduan makan ini memberikan informasi mengenai, antara lain, jumlah dan jenis makanan yang seimbang, gaya hidup sehat, serta pentingnya meminum air yang cukup dan beraktivitas fisik secara teratur. Meski sudah beredar lebih dari satu dekade, pedoman ini belum juga dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sosialisasi tentang PUGS yang lebih aplikatif perlu dilakukan ke berbagai kelompok masyarakat, khususnya kepada mereka yang mempunyai/mengasuh anak usia dini. Worsley (2010) menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya membuat kebijakan untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik pada anak dan juga kebijakan untuk mencegah kegemukan pada anak.

Dengan latar belakang seperti di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang pentingnya pendidikan gizi seimbang (GS) sejak usia dini melalui pendidikan anak usia dini (PAUD). Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan program/kegiatan yang sedang berjalan atau yang akan datang dalam upaya mencegah berkembangnya masalah *stunting* dan kegemukan pada anak yang saat ini jumlahnya mulai mengkhawatirkan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas anak yang nantinya akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wilayah dan Metodologi Penelitian

Dengan menggunakan data dari penelitian Damayanthi *et al.* (2010), studi ini dilakukan selama dua tahun dengan melibatkan sepuluh lembaga PAUD yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada masing-masing kecamatan dipilih lima lembaga PAUD yang

development process in Indonesia, there have also been an increasing number of people with overnutrition problems. In spite of the fact that, nationally, there have not been any data about children under five with overnutrition status, results of a study conducted by Dwiriani et al. (2010) on 1,030 elementary school students in Kota Bogor have shown a dual-occurrence tendency of nutritional problems. A 22.3% of the children are overweight and obese. Meanwhile, 7.3% and 12.8% of the children are respectively wasted and stunted. These conditions are allegedly the effects of less than optimum nutrient intake, health service, care, and educational stimulation which they received at their early age.

Efforts to overcome nutritional problems can be made through, among other things, a nutritional education approach by educational institutions. Through such institutions nutritional education can be widely provided to the people. Nutritional education has very wide and sustainable effects and it is easy to implement, even though the process takes a relatively long time. In 1995, the government issued a General Guide to Balanced Nutrition (Pedoman Umum Gizi Seimbang/PUGS) (Depkes, 2005). This guide provides information about, for example, the quantity and kinds of balanced food, healthy lifestyle, and the importance of drinking sufficient amount of water and doing physical activities regularly. Despite the fact that the guideline has been issued for more than one decade, it is still not widely known. Therefore, it is necessary to do a socialization of the PUGS in a more applicative way to various groups of people, especially to those who have—or look after—children of early age. Worsley (2010) stated that governments should make policies to socialize children to good eating habit as well as policies to prevent obesity among children.

Based on the above issues, this study aims to provide recommendations on the importance of the education on balanced nutrition for children since their early age through early childhood education (pendidikan anak usia dini/PAUD). It is hoped that these recommendations can be of reference for considering the improvements of the ongoing programs/activities, or for programs/activities to be carried out in the future, in order to prevent the problems of stunting and obesity among children (of which the number has started to raise concerns) from getting even worse. Therefore, it is hoped that the policy recommendations formulated will eventually be able to increase the quality of the children who in the future will determine the quality of Indonesia's human resources.

Research Area and Methodology

Using the data from a previous study by Damayanti et al. (2010), this study was conducted for two years by involving ten PAUD institutions located in Kecamatan Bogor Barat and Kecamatan Tanah Sareal in Kota Bogor, Jawa Barat. In each kecamatan

memiliki jumlah anak terbanyak dengan kisaran usia 3 sampai 5 tahun. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data jenis PAUD, kompetensi kader, pengetahuan gizi kader, serta keragaman pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersekolah di PAUD.

Untuk mengevaluasi penyelenggaraan PAUD yang sudah terintegrasi dengan posyandu, maka dilakukan analisis ketersediaan fasilitas yang mencirikan lembaga PAUD yang mulai menerapkan pendekatan holistik-integratif (tersedianya alat pantau pertumbuhan seperti timbangan dan alat ukur tinggi badan; Kartu Menuju Sehat/KMS, Kartu Kesehatan Ibu dan Anak/KIA); serta supervisi dari puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Bentuk layanan yang biasa disediakan oleh lembaga PAUD yang terintegrasi meliputi, antara lain, penimbangan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, pengobatan, bermain dengan teman sebaya, dan belajar.

Hasil dan Pembahasan

Sepuluh lembaga PAUD yang berpartisipasi dalam penelitian terdiri dari enam Kelompok Bermain (KB) dan empat Satuan PAUD Sejenis (SPS). Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk lembaga PAUD dengan serangkaian kegiatan berupa pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelompok SPS merupakan bentuk lembaga PAUD jalur nonformal selain KB dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak

(subdistrict), five PAUD institutions with the highest number of students of three to five years of age were selected. The data collected include both primary and secondary ones. The primary data consist of information about types of PAUD, competence and nutritional knowledge of the PAUD cadres, as well as the variation of the students' growth and development.

To evaluate the PAUD practices which has been integrated with posyandu (pos pelayanan terpadu, or the integrated health service post), analyses were conducted on the availability of facilities which characterize a holistic and integrative PAUD institution (growth monitoring devices such as scales and height measures; Child Health-Monitoring Card or Kartu Menuju Sehat/KMS, and Kartu Kesehatan Ibu dan Anak/KIA, or Mother and Child Health Card); and whether it was supervised by the community health center or the local health agency or not. Services usually provided by an integrated PAUD institution are, among other things, weighing, health counseling, immunization, vitamin A supplementation, medical treatment, activities of playing with children of the same age, and learning.

Results and Analysis

The ten PAUD institutions participating in this research consisted of six playgroups and four PAUD units of the same type (Satuan PAUD Sejenis/SPS). A playgroup is a form of PAUD institution with a range of activities that gives educational stimulation to children in order to help foster their growth and physical and mental development, so that they will be ready to continue further education.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan gizi adalah melalui pendekatan pendidikan gizi.

Efforts to overcome nutritional problems can be made through, among other things, a nutritional education approach.



<http://paudgrogogon.wordpress.com/2010/03/14/memahami-paud/>

usia dini yang telah ada di masyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Pendidikan Al-Quran, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa lembaga PAUD tercatat di Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) sebagai kelompok KB, namun saat dikonfirmasi, pihak pengelola menyatakan lembaga yang dikelolanya merupakan kelompok SPS. Hal ini menunjukkan terdapat ketidakjelasan kriteria untuk kelompok KB dan SPS. Dengan demikian, pengenalan konsep GS tidak perlu membedakan antara jenis PAUD karena jenis yang berbeda ternyata melaksanakan program yang sama.

Hasil penelitian Damayanthi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa pengintegrasian materi GS sangat mungkin dilakukan di PAUD. Pada kegiatan pelatihan untuk pelatih GS yang diperuntukkan bagi sejumlah kader PAUD di Kota Bogor, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan gizi kader meningkat secara nyata. Ini berarti bahwa konsep GS dapat diterapkan di PAUD melalui kader-kader yang sudah dibekali dengan pengetahuan gizi.

Integrasi materi GS pada kelompok PAUD dapat dilakukan melalui: (i) pembiasaan pada kegiatan di sentra, seperti sentra memasak, imajinasi, dan kreasi seni; (ii) kegiatan membawa bekal dan makan bersama; serta (iii) berbagai kegiatan kunjungan ke kebun sayur/buah, sawah, dan swalayan. Prinsip GS bagi anak usia dini akan lebih mudah dipahami oleh dan melekat pada anak jika disampaikan melalui teknik pembelajaran yang relevan dengan konteks dunia nyata dan menyenangkan, seperti contoh berikut.

- a) Prinsip variasi makanan dapat diintegrasikan ke dalam tema “makanan dan minuman.”
- b) Prinsip pentingnya pola hidup bersih dapat diintegrasikan ke dalam tema “lingkunganku.”
- c) Prinsip pentingnya pola hidup aktif dan berolah raga dapat diintegrasikan ke dalam berbagai tema yang terkait dengan kegiatan olah raga dan pembiasaan.
- d) Prinsip menjaga berat badan ideal diintegrasikan dalam kegiatan penimbangan berat badan yang dilakukan rutin setiap bulan diiringi dengan pemeriksaan kesehatan lainnya.

Berdasarkan indikator PAUD holistik-integratif, secara kelembagaan enam PAUD menyatakan institusinya telah terintegrasi dengan posyandu, sedangkan empat PAUD lainnya merasa belum terintegrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

SPS is a form of nonformal PAUD institution other than playgroups and day nurseries. Such an institution can be integrated with various existing programs of services for early age children such as posyandu, the Guiding Assistance for Families with Children Under Five (Bina Keluarga Balita/BKB), Early Childhood Center for Qur'an Learning (Taman Pendidikan Alquran), etc. Results of the research show that some PAUD institutions are registered at the Indonesian Association of Early Childhood Educators and Educational Officers (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini/Himpaudi) as playgroups, but, when asked for confirmation, the management said that their institutions were SPS. This indicates that the criteria set for playgroups and SPS are not clear. Therefore, the socialization of the balanced nutrition concept can be conducted without necessarily distinguishing the different types of the PAUD institutions as they, in fact, are implementing the same program.

The results of the study by Damayanthi et al. (2010) show that integrating the learning materials of balanced nutrition into the PAUD is highly feasible. During the training for trainers on balanced nutrition held for a number of PAUD cadres in Kota Bogor, it was apparent that the cadres' knowledge on nutrition has increased. It means that the balanced nutrition concept can be applied into the PAUD program by the cadres who have been provided with the nutritional knowledge.

Integrating the materials on balanced nutrition into the PAUD groups can be implemented through: (i) socialization in community centers such as centers for cooking, imagination learning, and art creation; (ii) activities of bringing meal and eating it together with friends; and (iii) visits to vegetable/fruit gardens, paddy fields, and supermarkets. Balanced-nutrition principles will be easier for early age children to understand and, at the same time, will be more deeply internalized when introduced through contextual and fun learning such as the following.

- a) *The principle of food variation can be integrated into the “food and beverage” theme.*
- b) *The principle of the importance of a clean lifestyle can be integrated into “my environment” theme.*
- c) *The principle of the importance of physical exercise and active lifestyle can be integrated into various themes related to physical exercise and habit-forming practices.*
- d) *The principle of maintaining the ideal body weight can be integrated into a regular weighing activity, held every month along with other health checks.*

Based on the indicators for a holistic and integrative PAUD institution, six PAUD institutions stated that they have been integrated with posyandu, while the other four considered themselves

hampir semua PAUD memiliki KMS/KIA (80%) dan alat pemantau pertumbuhan (70%). Sebagian kecil PAUD yang tidak memiliki alat pemantau pertumbuhan belum memenuhi salah satu persyaratan sebagai PAUD terintegrasi. Namun, pemantauan pertumbuhan yang dilakukan oleh pengelola atau kader tidak sampai kepada perhitungan status gizi. Hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan kader PAUD dan posyandu tentang teknik penilaian status gizi anak. Hasil penelitian Damayanthi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa status gizi sebagian besar anak PAUD termasuk kategori normal berdasarkan indikator berat badan/umur (83,9%), tinggi badan/umur (82,0%) dan berat badan/tinggi badan (83,1%). Adapun yang kegemukan adalah 9,68%, *wasted* 9% dan *stunted* 16%. Masalah gizi ganda ini juga terjadi pada anak SD di Kota Bogor, bahkan dengan prevalensi lebih besar pada status gizi *overweight* dan *obese* (Dwiriani *et al.* 2010).

Selain pertumbuhan, indikator lainnya yang juga harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh lembaga PAUD yang terintegrasi adalah pemantauan perkembangan anak. Hasil penelitian Damayanthi *et al.* (2010) menunjukkan kecenderungan bahwa anak *stunted* mempunyai perkembangan sosial yang relatif lebih rendah, dilihat dari lebih sedikit anak yang bisa bergaya dan mau bermain dengan teman. Selain itu, sebagian besar anak memiliki capaian perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik kasar yang baik, ditunjukkan dengan persentase capaian perkembangan lebih dari 80%. Di sisi lain, dimensi motorik halus sebagian besar anak termasuk kategori cukup sehingga masih memerlukan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan. Untuk stimulasi psikososial, ternyata stimulasi bahasa, kehangatan dan penerimaan, akademik,

*not integrated yet. The evaluation results show that 80% of those PAUD institutions have the KMS/KIA and 70% of them have the growth monitoring devices. The small number of PAUD institutions that do not have the growth monitoring devices have not met one of the requirements to be an integrated PAUD institution. However, the growth monitoring carried out by PAUD organizers or cadres did not include an assessment of the nutritional status. This is due to the limited knowledge of the PAUD and posyandu cadres in regard to techniques for child's nutritional status assessment. Results of the study by Damayanthi *et al.* (2010) show that the nutritional status of most of the PAUD students was categorized as normal on the basis of the indicators of weight/age (83.9%), height/age (82.0%), and weight/height (83.1%). The rest of the students were obese (9.68%), wasted (9%), and stunted (16%). The similar dual nutritional problem was also found among elementary school students in Kota Bogor, with even higher prevalence in the nutritional statuses of overweight and obese (Dwiriani *et al.*, 2010).*

*Another program indicator, besides growth monitoring, which also needs to be implemented and evaluated by an integrated PAUD institution is child's development monitoring. Damayanthi *et al.* (2010) show that stunted children tend to have a lower level of social competency development; it was seen from the fact that only a few of them were able to express themselves well and willing to play with their friends. Additionally, most of the students have made satisfactory achievements in cognitive, linguistic, and gross motor skill developments; it was indicated by the development achievement which was over 80%. On the other hand, for the aspect of fine motor skills, the developments of most of the children were categorized as just fair, thereby in need of suitable and sustainable stimulation. For psychosocial dimension, apparently linguistic, warmth and acceptance, modeling, and academic stimulating processes were categorized as satisfactory, yet learning and physical-environment*

Prinsip GS lebih mudah melekat pada anak jika disampaikan melalui teknik pembelajaran yang relevan dengan konteks dunia nyata dan menyenangkan.

The socialization of balanced-nutrition principles will be easier for early age children to internalize when those principles are introduced through contextual and fun learning.



<http://pkk-kabgorontalo.blogspot.com/2010/10/blog-post.html>

dan modeling termasuk kategori baik, tetapi stimulasi belajar, lingkungan fisik, dan variasi stimulasi kepada anak termasuk kategori sedang sehingga masih perlu ditingkatkan oleh PAUD.

Adanya supervisi rutin dari puskesmas dan dinas terkait (misalnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) ke lembaga PAUD merupakan salah satu karakteristik penyelenggaraan PAUD holistik-integratif. Damayanthi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga PAUD telah mendapatkan supervisi dari dinas terkait dan puskesmas sehingga memenuhi salah satu persyaratan sebagai penyelenggara PAUD holistik-integratif.

Salah satu kriteria lain dari penyelenggaraan PAUD holistik-integratif adalah penyelenggaraan PAUD dan posyandu pada satu tempat sehingga bentuk layanan yang disebutkan di atas bisa diberikan. Namun, kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lembaga PAUD yang telah memenuhi seluruh bentuk layanan secara lengkap. Sebagian besar PAUD holistik-integratif hanya memberikan layanan bermain dan belajar bersama. Bentuk layanan kesehatan yang disediakan oleh sebagian besar PAUD holistik-integratif adalah penimbangan dan imunisasi. Bentuk layanan yang paling jarang bahkan hampir tidak pernah disediakan adalah pengobatan.

Jika merujuk kepada persyaratan kompetensi kader/pengelola PAUD (Bappenas 2010), tidak banyak kader/pengelola yang memenuhi persyaratan tersebut. Damayanthi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar kader/pengelola PAUD merupakan sumber daya sukarela yang memiliki kepedulian dan minat terhadap anak usia dini, namun tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang PAUD atau pemahaman mengenai aspek gizi dan kesehatan yang memadai.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan GS melalui PAUD perlu dilaksanakan terus menerus, mengingat sudah terjadi transisi masalah gizi di Indonesia dari penyakit menular ke penyakit tidak menular.
2. Pengetahuan GS kader PAUD perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus.
3. Materi GS harus diintegrasikan ke dalam tema-tema yang diajarkan kepada anak di PAUD melalui pembelajaran tematik dan dilaksanakan pada kegiatan: (i) pembiasaan di sentra seperti sentra memasak, imajinasi, dan kreasi seni; (ii) membawa bekal dan makan bersama; dan (iii) kunjungan ke kebun sayur/buah, sawah, dan swalayan.

stimulating processes as well as variation of stimulation to the children were categorized as moderately adequate, thereby still in need of further improvements carried out by the PAUD.

The regular supervisions by community health centers and relevant government agencies (such as the local health or education agencies) are among the characteristics of the holistic-integrative PAUD organization. Damayanthi et al. (2010) show that almost all of the PAUD institutions have been supervised by the community health centers and relevant government agencies, thus considered to have met one of the requirements to be a holistic-integrative PAUD organizer.

Another requirement for a holistic-integrative PAUD is that it should be organized along with posyandu activities at the same venue to conduct the various services mentioned above. However, facts from the field reveal that none of the PAUD institutions has provided all of the services completely. Most of the holistic-integrative PAUD institutions only provided the services of learning together and playing together. The kinds of health services provided by most of the holistic-integrative PAUD institutions are weighing and immunization. Medical treatment is rarely or even not provided at all.

In regard to the competency requirements of PAUD cadres or organizers (Bappenas, 2010), it can be seen that not many of the PAUD cadres or organizers meet the requirements. Damayanthi et al. (2010) show that most of them are volunteers who have concerns on—and interests in—early age children but do not have the relevant educational background nor adequate understanding on health and nutrition.

Policy Recommendations

The following recommendations are based on the findings above.

1. *Considering that there has been a transition in nutritional problems in Indonesia from the situation dominated by communicable diseases into one dominated by noncommunicable diseases, the education on balanced nutrition needs to be implemented continuously.*
2. *PAUD cadres' knowledge on balanced nutrition needs to be improved through special training.*
3. *The materials on balanced nutrition should be integrated into the themes taught to the PAUD students through thematic learning and should be implemented in the following activities: (i) socialization in community centers such as centers for cooking, imagination learning, and art creation; (ii) activities of bringing meal and eating it together with friends; and (iii) visits to vegetable/fruit gardens, paddy fields, and supermarkets.*

4. Perlu adanya sosialisasi indikator PAUD terintegrasi agar kader atau pengelola PAUD mendapat gambaran dan arahan dalam penyelenggaraan PAUD terintegrasi. Indikator-indikator yang telah disusun diterjemahkan dalam bentuk yang lebih teknis dan mudah dipahami oleh kader atau pengelola. Jika mencermati indikator-indikator di atas penting juga untuk memasukkan prinsip GS yang terdiri dari empat hal, yaitu variasi makanan, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan berolah raga, serta berat badan ideal.

5. Perlu diadakan pengajaran kompetensi pengukuran, pendampingan, dan pemantauan bagi kader PAUD, seperti teknik pengumpulan dan pengolahan data serta sarana yang mendukung, misalnya angket atau formulir isian yang standar, teknik pengukuran berat badan dan tinggi badan yang benar, serta cara menetapkan status gizi yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak. Selain itu, juga perlu diperkenalkan teknik pengukuran berbagai dimensi perkembangan anak dengan menggunakan instrumen yang sederhana dan mudah dipahami.

“Sebagian besar kader/ pengelola PAUD merupakan sumber daya suka rela yang memiliki kepedulian dan minat terhadap anak usia dini, namun tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang PAUD serta pemahaman mengenai aspek gizi dan kesehatan yang memadai.”

“Most PAUD cadres or organizers are volunteers who have concerns on—and interests in—early age children but do not have the relevant educational background as well as adequate understanding on health and nutrition.”

4. There needs to be a socialization of the integrated PAUD indicators so that PAUD cadres or organizers obtain the descriptions and directions of how to organize an integrated PAUD. Indicators that have been formulated should be translated into the forms which are more technical and easier for the cadres or organizers to understand. It is also important to include the principle of balanced nutrition consisting of four elements—food variation, clean lifestyle, active lifestyle and physical exercise, and ideal body weight.

5. There should be courses for PAUD cadres on measurement, guiding, and monitoring competencies, such as techniques for data collection and analysis along with the supporting materials (for example, questionnaires or the standard blanks), techniques for proper measurement of body weight and height, and the appropriate ways to

assess a child's nutritional status according to a child's age and sex. In addition, techniques for measuring various dimensions of child development by using simple and easy-to-understand instruments need to be introduced as well.

Penutup

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah saat ini perlu diiringi dengan upaya pembiasaan hidup sehat sejak usia dini. Pendidikan gizi sejak usia dini kepada peserta PAUD penting dilakukan untuk memperkenalkan konsep dan cara hidup sehat agar tertanam dengan baik sehingga dapat terus dipraktikkan oleh anak sepanjang rentang kehidupannya. Pelatihan GS bagi kader PAUD menjadi langkah awal yang strategis untuk mencapai hal tersebut. Pada lembaga PAUD langkah tersebut harus diikuti dengan sosialisasi indikator PAUD terintegrasi dan penguatan kapasitas dan kompetensi kader PAUD. Selanjutnya, harus dilakukan usaha menghadirkan lingkungan belajar yang sehat yang dilakukan dengan pembinaan gizi serta penjaminan keamanan dan kebersihan makanan jajanan di lingkungan lembaga PAUD. Dengan demikian, diharapkan usaha untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat, berkualitas, dan mampu bersaing secara global dapat tercapai. ■

Conclusion

Current government's efforts to improve the quality of human resources need to be accompanied with similar efforts to socialize healthy lifestyles to children since their early age. The nutritional education for PAUD students is important in order to introduce the concept and ways of healthy lifestyle so that they will be embedded well in the children's minds and be practiced continuously during their lifetime. Training on balanced nutrition for PAUD cadres can be a strategic first step to realize it. At the PAUD institution level, the step should be followed by a socialization of the integrated PAUD indicators and capacity building as well as competency improvement for PAUD cadres. After that, efforts should be made to create a healthy learning environment by providing a nutritional supervision and by assuring that snacks available around a PAUD institution's area are safe and hygiene. It is thus hoped that the ideal of a future generation that is healthier, qualified, and capable of competing globally can be realized. ■

DAFTAR ACUAN

- Bappenas (2010) *Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*. Jakarta: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan. Jakarta: Bappenas.
- Damayanthi, Evy, Cesilia Meti Dwiriani, Lilik Kustiyah, dan Neti Hernawati (2010) 'Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak melalui Pendidikan Gizi dan Kesehatan serta Stimulasi Psikososial: Pengembangan Model.' Laporan Akhir Penelitian Strategis Nasional. Tahun Pertama. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Depkes (2010) 'Laporan Nasional Riskesdas 2010.' Jakarta: Departemen Kesehatan.
- . (2005) *Pedoman Umum Gizi Seimbang*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Dwiriani, Cesilia Meti, Evy Damayanti, Lilik Kustiyah, Dodik Briawan (2010) 'Peningkatan Kapasitas Sekolah menuju Perilaku Gizi Seimbang: Implementasi Model KIE Gizi Seimbang.' Laporan Akhir Program Ipteks bagi Wilayah. Tahun Kedua. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Worsley, Anthony (2010) 'Towards a Children's Food and Nutrition Policy' [Menuju Kebijakan Makanan dan Gizi untuk Anak-anak]. Dalam *Childhood Obesity Prevention, International Research, Controversies, and Interventions*. Jennifer A. O'Dea dan Michael Erikson (eds.) Oxford: Oxford University Press: 229-239.

LIST OF REFERENCES

- Bappenas (2010) *Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif* [A General Guide to a Holistic-integrative Early Childhood Development]. Jakarta: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Bappenas.
- Damayanthi, Evy, Cesilia Meti Dwiriani, Lilik Kustiyah, and Neti Hernawati (2010) 'Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak melalui Pendidikan Gizi dan Kesehatan serta Stimulasi Psikososial: Pengembangan Model.' [Optimization of Child Growth and Development through Nutritional and Health Education as well as Psychosocial Stimulation: a Model Development]. Laporan Akhir Penelitian Strategis Nasional. Tahun Pertama. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Depkes (2010) 'Laporan Nasional Riskesdas 2010' [The National Report of the 2010 Basic Health Research]. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- . (2005) *Pedoman Umum Gizi Seimbang* [A General Guide to Balanced Nutrition]. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Dwiriani, Cesilia Meti, Evy Damayanti, Lilik Kustiyah, and Dodik Briawan (2010) 'Peningkatan Kapasitas Sekolah menuju Perilaku Gizi Seimbang: Implementasi Model KIE Gizi Seimbang' [Capacity Building for Schools towards the Balanced-Nutrition Minded Behavior: Implementation of the Communication, Information, and Education Model of Balanced Nutrition]. Laporan Akhir Program Ipteks bagi Wilayah. Tahun Kedua. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Worsley, Anthony (2010) 'Towards a Children's Food and Nutrition Policy.' In *Childhood Obesity Prevention: International Research, Controversies, and Interventions*. Jennifer A. O'Dea and Michael Erikson (eds.) Oxford: Oxford University Press: 229–339.

Konsep GS dapat diterapkan di PAUD melalui kader-kader yang sudah dibekali dengan pengetahuan gizi.

The balanced nutrition concept can be applied into the PAUD program by the cadres who have been provided with the nutritional knowledge.



<http://nuhidayalpurwaktartablogspot.com/>